



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN 2020



**DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	3
DAFTAR TABEL.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1 LATAR BELAKANG	5
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.3 KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	6
1.4 STRUKTUR ORGANISASI.....	6
1.5 ISU-ISU STRATEGIS.....	7
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 RENCANA STRATEGIS	9
2.1.1 VISI & MISI.....	10
2.1.2 SASARAN STRATEGIS.....	10
2.2 PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.3 PENGUKURAN KINERJA	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	14
3.1.1 Sasaran Strategis 1.....	18
3.1.2 Sasaran Strategis 2.....	18
3.1.3 Sasaran Strategis 3.....	19
3.1.4 Sasaran Strategis 4.....	21
3.1.5 Sasaran Strategis 5.....	24
3.1.6 Sasaran Strategis 6.....	26
3.1.7 Sasaran Strategis 7.....	39
3.1.8 Sasaran Strategis 8.....	46

3.1.9 Sasaran Strategis 9.....	47
3.1.10 Sasaran Strategis 10.....	53
3.1.11 Sasaran Strategis 11.....	68
3.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	70
BAB. IV PENUTUP.....	79
4.1.Internal.....	79
4.2.Eksternal.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi.....	7
Gambar 2. 1 Peta Strategis	11
Gambar 2. 2 Formula Perhitungan Kinerja	13
Gambar 2. 3 Status Kinerja	13
Gambar 3. 1 Bobot Provinsi.....	17
Gambar 3. 2 Data Release Ditjen PHPL.....	19
Gambar 3. 3 Tabel.Perkembangan Nilai Ekspor Produk Kehutanan dalam	22
Gambar 3. 4 Tabel.Capaian Nilai Ekspor Produk Jasa Kehutanan.....	23
Gambar 3. 5 Peta Indeks Kualitas Air 2019	25
Gambar 3. 6 Capaian Kegiatan Strategi 1 RAN PSL di tahun 2018 – 2020	29
Gambar 3. 7 Capaian Kegiatan Strategi 2 RAN PSL di tahun 2018 – 2020	31
Gambar 3. 8 Capaian Kegiatan Strategi 3 RAN PSL di tahun 2018 – 2020	33
Gambar 3. 9 Capaian Kegiatan Strategi 4 RAN PSL di tahun 2018 – 2020	35
Gambar 3. 10 Capaian Kegiatan Strategi 5 RAN PSL di tahun 2018 - 2020	37
Gambar 3. 11 Rapat Koordinasi Antisipasi Bencana	41
Gambar 3. 12 Mekanisme Kerja Sistem Peringatan Dini Tsunami (Ina TEWS)	42
Gambar 3. 13 Diagram Pegawai	47
Gambar 3. 14 Upload Video Zi Di Media Youtube.....	62
Gambar 3. 15 Penginputan Evidence Pelaksanaan RB Pada Aplikasi E-RB Kemenko Marves	63
Gambar 3. 16 SIMAS.....	64
Gambar 3. 17 PCM.....	64
Gambar 3. 18 Draft SOP Pasca Penyederhanaan Birokrasi Deputy PLK	64
Gambar 3. 19 Rekapitulasi Kebutuhan JF & Pelaksana.....	65
Gambar 3. 20 Draft Anjab dan ABK Pasca penyederhanaan Birokrasi	65
Gambar 3. 21 Draft SKP Semester II Tanggal 31 Desember Tahun 2020.....	66
Gambar 3. 22 Penginputan Data Pegawai PLK dalam Aplikasi Marves HR Kemenko Marves	66
Gambar 3. 23 Penerimaan Apresiasi dan Penganugerahan Piagam Penghargaan sebagai Unit Kerja ZI berpredikat WBK dari Kemenpan RB tanggal 21 Desember 2020	67
Gambar 3. 24 Presentase Penyerapan Anggaran Unit Kerja Eselon 2 pada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan s.d Triwulan IV T.A 2020	74
Gambar 3. 25 Presentase Penyerapan Anggaran Unit Kerja Eselon 2 pada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan s.d Triwulan IV T.A 2020	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Fungsi	6
Tabel 2. 1 Target Indikator Kineja	12
Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	14
Tabel 3. 2 Indikator Parameter IKLH	16
Tabel 3. 3 Tabel Nilai	17
Tabel 3. 4	46
Tabel 3. 5 <i>Internal Bisnis Perspective</i>	47
Tabel 3. 6 Hasil Assessment Deputi 4	48
Tabel 3. 7 <i>Sasaran Strategis 10</i>	53
Tabel 3. 8 Pagu Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang masih menempel pada output 5761 anggaran Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim (SOTK Lama) pada DIPA Awal Satker Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi TA 2020	70
Tabel 3. 9 Struktur Anggaran Kode	71
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran s.d Triwulan IV TA. 2020 Per Unit Kerja II Lingkup Deputi	73
Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Triwulan IV TA. 2020 berdasarkan Mekanisme Pembayaran	74
Tabel 3. 12 Monitoring Kontrak	75
Tabel 3.13 Pemberkasan SPJ Keuangan berdasarkan Mekanisme Pembayaran LS dan Kontraktual s.d Triwulan IV Tahun 2020	76

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan ini merupakan pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan selama Tahun 2020. Laporan ini menjelaskan pencapaian kinerja dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi yang meliputi capaian kinerja indikator kinerja program, capaian kinerja *output* serta capaian *outcome*. Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun diperlukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan kualitas *outcome* dan *output* sesuai target.

Namun demikian, kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam Laporan Kinerja ini, dan tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan yang masih diperlukan dalam rangka penyesuaian kedepannya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, dan pendorong peningkatan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

Jakarta, 11 Januari 2021
Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan dan Kehutanan



Nani Hendiarti

LAKIP

Tahun 2020



Bab I



**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan fakta geografis, tidak dapat dipungkiri, Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia. 16.056 pulau telah diakui oleh PBB (dengan catatan, proses pembakuan masih terus berjalan) yang terbentang dari pulau Rondo di ujung Sumatera hingga ujung Merauke di Papua adalah fakta yang menegaskan hal tersebut. Namun tidak cuma itu, pulau-pulau yang terbentang di wilayah laut seluas 5.8 juta km² dalam wilayah Indonesia juga menegaskan posisi penting Indonesia sebagai sebuah benua maritim dengan wilayah laut mencakup 70% dari total wilayah dan terletak di posisi silang strategis jalur perdagangan dunia.

Sebagai negara yang berada pada poros perdagangan dunia, posisi silang Indonesia tidak hanya penting dalam konteks perdagangan internasional namun juga melahirkan karakteristik sumber daya hayati yang sangat beragam dan khusus, namun Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim berpotensi menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang. Oleh karenanya upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan pengendalian perubahan iklim telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menurunkan emisi dan intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) melalui penerapan pendekatan pembangunan rendah karbon.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan terkait pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran selama Tahun 2020 berdasarkan sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian sasaran kinerja terkait pelaksanaan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian di Lingkup DDeputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan selama Tahun 2020. Hasil dari evaluasi yang telah dilakukan kemudian dirumuskan menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

1.3 KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

Tabel 1.1 Fungsi

1	Mengefektifkan jalannya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan
2	Mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan
3	Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan secara tepat dan akurat
4	Membangun dan mengembangkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi di bidang koordinasi pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang responsif ; dan
5	Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator terkait bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan sesuai arahan .

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan didukung oleh 5 (lima) Asisten Deputi dan 1 (Satu) Sekretaris Deputi. Sebagaimana ditampilkan pada Diagram dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.5 ISU-ISU STRATEGIS

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat sembilan misi dimana aspek lingkungan hidup merupakan misi ke-4 yakni “Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan”. Dalam mengimplementasikan misi tersebut, telah ditetapkan lima pilar pembangunan nasional yang diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas nasional. Ketujuh agenda pembangunan dimaksud yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Isu Strategis yang terkait dengan Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada tahun 2020 yaitu :

1. Pemanfaatan kawasan hutan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui program Perhutanan Sosial (PS);

2. peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan, dalam hal ini terit dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK);
3. Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
4. Pengendalian Penanganan Sampah Laut;
5. Pengendalian Kebijakan Resiko Bencana;
6. Pengendalian Kebijakan terkait *Carbon Pricing* (Nilai Ekonomi karbon);
7. Pengembangan *Food Estate* di Sumatera Utara.

LAKIP

Tahun 2020



Bab II



**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN**

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi sektor lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia antara lain: pencemaran lingkungan oleh limbah; penumpukan sampah/sampah plastik di daratan dan sampah laut yang bersumber dari aktivitas yang berbasis daratan maupun dari laut; emisi gas rumah kaca; perubahan iklim global; perambahan kawasan hutan; kebakaran hutan dan lahan (karhutla) banjir rob akibat penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut; penataan dan restorasi gambut; penataan dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS) dan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau endemik; serta faktor-faktor lain yang menurunkan kualitas lingkungan dan ekosistem hutan. Untuk itu pembangunan lingkungan dan kehutanan Indonesia harus **dirancang untuk dapat memberikan kemanfaatan ekonomi secara luas dan optimal dengan tetap mengutamakan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya**. Sehingga keberadaan lingkungan dan sumber daya hutan bagi kehidupan masyarakat Indonesia bisa mencapai kondisi **lestari**, baik secara **ekologi, ekonomi, maupun sosial**.

Dalam jangka panjang diperlukan upaya-upaya pemulihan lingkungan dan hutan secara menyeluruh dengan skala yang lebih luas, mencakup penataan ulang alokasi sumber daya hutan, pemenuhan komitmen Indonesia dalam kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca yang dituangkan dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan pengendalian perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan/gambut, serta **penapaian tujuan pembangunan berkelanjutan** (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Sasaran pembangunan lingkungan dan kehutanan Indonesia ke depan secara garis besar diarahkan pada perwujudan: 1) Lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim; 2). Pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk capaian nilai keekonomian optimum; 3). Distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan 4). Tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan dan kehutanan yang semakin berdaya saing.

Penciptaan kondisi lestari secara ekologi, ekonomi dan sosial ini, seyogyanya ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan lingkungan dan kehutanan nasional yang berkelanjutan, karena bertujuan membuka kemanfaatan seluas-luasnya bagi keterlibatan **masyarakat dan dunia usaha**, baik di **tingkat pusat** maupun **daerah**. Dengan demikian, maka pemanfaatan sumber daya lingkungan dan kehutanan mencakup spektrum yang lebih luas, sehingga tidak hanya berdampak dalam skala **lokal** maupun **nasional**, tetapi juga mampu **menjawab tantangan internasional**.

2.1.1 VISI & MISI

Visi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tidak terlepas dari 5 (lima) sasaran strategis Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi yang sangat terkait dengan tugas fungsi Deputy Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, sebagai pengejawantahan dari Visi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu: Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia; dan Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam; dan tentunya dengan memperhatikan pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis. Untuk itu Deputy Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menetapkan Visinya adalah sebagai berikut:

“MEMBANGUN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN SECARA EKOLOGI, EKONOMI, MAUPUN SOSIAL”

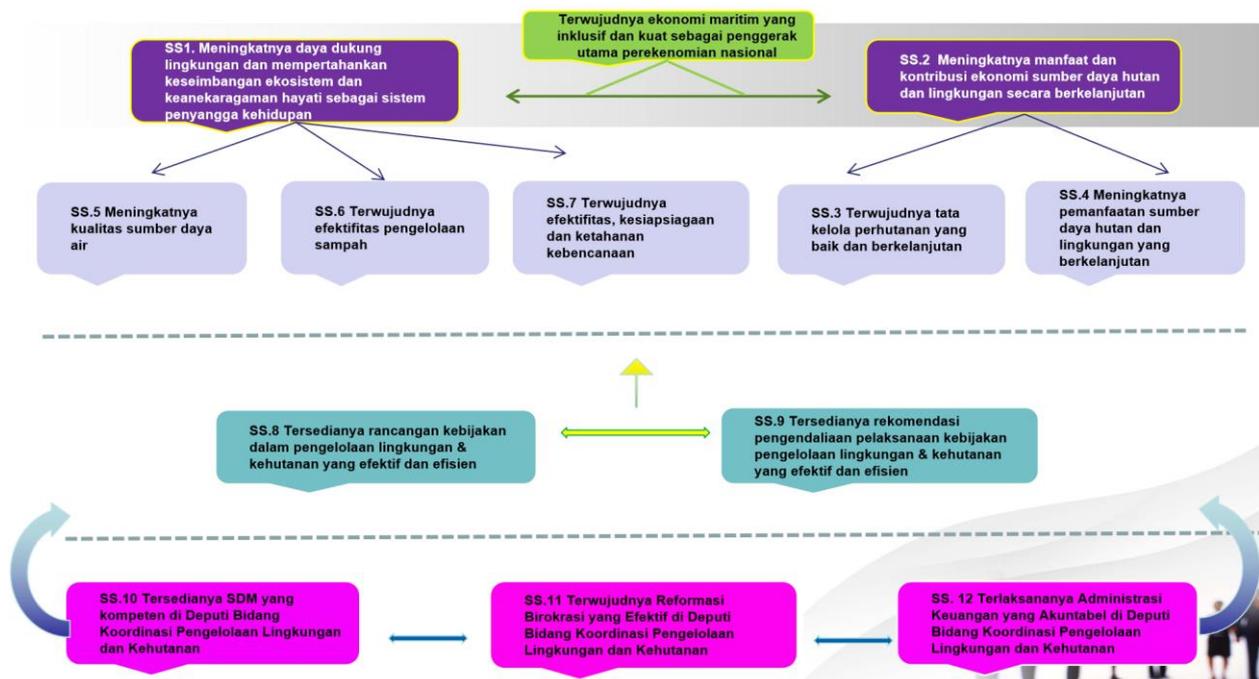
Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kedeputusan Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, adalah sebagai berikut:

“MENJALANKAN EFEKTIVITAS KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN, SERTA PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN SECARA EKOLOGI, EKONOMI, MAUPUN SOSIAL”

Misi tersebut merupakan langkah peran dan fungsi Kedeputusan dalam mengupayakan dan memastikan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, tentang aspek lingkungan hidup (misi ke-4 dan agenda ke-6) dalam Pembangunan Nasional, yaitu terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang memiliki ketahanan yang baik terhadap bencana dan mampu merespon perubahan iklim. Pelaksanaannya diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan; Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Konservasi Sumber Daya Alam; Pengelolaan Sampah dan Limbah; serta Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan.

2.1.2 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis untuk pencapaian visi dan misi Deputy Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menggunakan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada Peta strategis berikut :



Gambar 2.1 Peta Strategis

Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan membagi sasaran kedeputian ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif pengguna (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal bussines process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Peta strategi ini memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan melalui 2 (dua) sasaran strategis utama yakni:

- 1) Meningkatnya daya dukung lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan; dan
- 2) Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.2 PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dan dievaluasi per triwulan. Rencana dan target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Meningkatnya daya dukung lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66.95
SS.2	Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan	2	PDB Kehutanan Pertumbuhan 2019: - 0,23%	1%
Customer Perspective				
SS.3	Terwujudnya tata kelola perhutanan yang baik dan berkelanjutan	3	Persentase Capaian Luas Kawasan Perhutanan sosial	80%
SS.4	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan	4	Persentase target nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu	80%
SS.5	Meningkatnya kualitas sumber daya air	5	Nilai peningkatan kualitas sumber daya air	55.1
SS.6	Terwujudnya efektifitas pengelolaan sampah	6	Tingkat Efektifitas penanganan sampah	50.48 %
SS.7	Terwujudnya efektifitas, kesiap siagaan dan ketahanan kebencanaan	7	Indeks Risiko Bencana (IRB) Nasional	< 144
Internal Business Perspective				
SS.8	Terwujudnya efektifitas rancangan kebijakan Di Bidang pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien	8	Persentase Rancangan Kebijakan yang diterbitkan	50%
		9	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan yang dilaksanakan	50%
Learning & Growth Perspective				
SS.9	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang sesuai Kompetensi	90%
SS.10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	11	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	75

		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	>65
SS.11	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	13	Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	95

2.3 PENGUKURAN KINERJA

Penilaian hasil Laporan Kinerja Akhir Tahun Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Dan Kehutanan Tahun 2020 dilakukan sesuai panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja. Perhitungan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan realisasinya. Metode perhitungan Nilai Kinerja diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diketahui Nilai Kinerja Organisasi. Formula penghitungan Kinerja sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Gambar 2. 2 Formula Perhitungan Kinerja

Adapun Status Kinerja ditandai dengan warna, pemberian warna sesuai nilai kinerja, adalah sebagai berikut:

Hijau	Kuning	Merah
$X \geq 100$	$80 \leq X \leq 100$	$X \leq 80$
Memenuhi Kriteria	Belum Memenuhi	Tidak Memenuhi

Gambar 2. 3 Status Kinerja

LAKIP

Tahun 2020



Bab III



**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN**

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Capaian target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan didasarkan pada Stake Holders perspective, customer perspective, Internal Business Process dan Learning and Growth Tahun 2020. Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2020 juga membandingkan target kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya, serta membandingkan capaian tahun ini dengan target capaian dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Setelah itu, dilakukan analisis atas capaian terkait hal-hal yang menunjang atau menurunkan capaian kinerja, analisis sumber daya dan program penunjang tercapainya kinerja.

Dalam rangka mencapai target kinerja tahunan sebagai pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan Bidang Pengelolaan lingkungan dan Kehutanan Tahun 2020, dilaksanakan 11 sasaran strategis yang secara rinci dijelaskan di bawah ini:

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN	% Capaian
Stakeholder Perspective					
SS.1	Meningkatnya daya dukung lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66.95	100%
SS.2	Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan	2	PDB Kehutanan Pertumbuhan 2019: - 0,23%	1%	100%
Customer Perspective					
SS.3	Terwujudnya tata kelola perhutanan yang baik dan berkelanjutan	3	Persentase Capaian Luas Kawasan Perhutanan sosial	125.000 Ha	328%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN	% Capaian
SS.4	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan	4	Persentase target nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu	80%	119%
SS.5	Meningkatnya kualitas sumber daya air	5	Nilai peningkatan kualitas sumber daya air	55.1	95%
SS.6	Terwujudnya efektifitas pengelolaan sampah	6	Tingkat Efektifitas penanganan sampah	50.48%	136%
SS.7	Terwujudnya efektifitas, kesiap siagaan dan ketahanan kebencanaan	7	Indeks Risiko Bencana (IRB) Nasional	< 144	100%
Internal Bisnis Perspective					
SS.8	Terwujudnya efektifitas rancangan kebijakan Di Bidang pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien	8	Persentase Rancangan Kebijakan yang diterbitkan	50%	100%
		9	Persentase Rekomendasi Pengendalian Kebijakan yang dilaksanakan	50%	100%
Learning & Growth Perspective					
SS.9	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	10	Persentase SDM Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang sesuai Kompetensi	90%	100%
SS.10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	11	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	75	125%
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	>65	100%
SS.11	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	13	Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	95	100%
TOTAL KINERJA					145%

3.1.1 Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan Dan Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Dan Keanekaragaman Hayati Sebagai Sistem Penyangga Kehidupan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indicator Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan IKLH Tahun 2019 dihitung berdasarkan:

1. Data hasil pemantauan kualitas air dari 34 Provinsi;
2. Data hasil pemantauan kualitas udara pada kawasan-kawasan transportasi, pemukiman, industri dan komersial dari 427 kabupaten/kota; dan
3. Data hasil analisis citra satelit tutupan lahan dan data tabular ruang terbuka hijau, kebun raya serta taman kehati (keanekaragaman hayati).

Tabel 3. 2 Indikator Parameter IKLH

No	Indikator	Parameter	Bobot
1.	Kualitas Air Sungai	TSS DO BOD COD Total Fosfat Fecal Coliform Total Coliform	30%
2.	Kualitas Udara	SO ₂ NO ₂	30%
3.	Kualitas Tutupan Lahan	Luas Tutupan Hutan, belukar dan belukarrawa yang beradadikawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung (sempadan sungai, danaudanpantai, lereng >25%) RuangTerbuka Hijau, KebunRayadanTaman Keanekaragaman Hayati	40%

Perhitungan IKA, IKU, dan IKTL dihitung untuk setiap Provinsi. Sementara nilai IKA, IKU, dan IKTL Nasional merupakan agregasi dari nilai IKA, IKU, dan IKTL semua provinsi dengan memberikan bobot setiap provinsi berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Nilai IKA, IKU, dan IKTL provinsi. Bobot provinsi dihitung sebagai berikut:

$$\text{Bobot_Provinsi}_i = \left(\frac{\text{Populasi_Provinsi}_i}{\text{Populasi_Indonesia}} + \frac{\text{Luas_Provinsi}_i}{\text{Luas_Indonesia}} \right) \div 2$$

Gambar 3. 1 Bobot Provinsi

Pada Tahun 2019 nilai **IKLH yaitu 66,55**. Nilai IKLH tersebut dipengaruhi oleh nilai IKA sebesar 52,62, nilai IKU sebesar 86,56 dan nilai IKTL sebesar 62,00. Nilai IKLH 2019 masuk dalam predikat cukup baik. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai IKLH mengalami penurunan sebesar 5,12 poin, penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan IKA sebesar 20,15 poin. Sementara nilai IKU dan IKTL 2019 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,82 dan 0,97 poin. Penurunan IKLH lebih disebabkan oleh perubahan penggunaan metode perhitungan IKA. Nilai IKA, IKU, IKTL, dan IKLH setiap provinsi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 3 Tabel Nilai

No	Provinsi	IKU	IKA	IKTL	IKLH
1	Aceh	91,08	60,56	76,57	76,12
2	Sumatera Utara	86,58	51,11	52,95	62,49
3	Sumatera Barat	89,40	53,19	67,16	69,64
4	Riau	90,47	53,55	48,15	62,47
5	Jambi	87,17	58,49	60,90	68,06
6	Sumatera Selatan	87,13	64,45	39,84	61,41
7	Bengkulu	92,69	47,64	55,78	64,41
8	Lampung	86,63	55,74	36,65	57,37
9	Bangka Belitung	91,94	69,29	41,21	64,85
10	Kepulauan Riau	90,59	54,00	59,06	67,00
11	DKI Jakarta	67,97	41,94	24,66	42,84
12	Jawa Barat	74,93	45,59	38,70	51,64
13	Jawa Tengah	84,81	51,64	50,08	60,97
14	DI Yogyakarta	85,19	35,37	32,69	49,24
15	Jawa Timur	83,06	50,79	50,23	60,25
16	Banten	74,98	43,11	39,16	51,09
17	Bali	89,85	65,33	41,34	63,09
18	Nusa Tenggara Barat	87,40	40,23	65,67	64,56
19	Nusa Tenggara Timur	88,18	59,48	63,42	69,67

20	Kalimantan Barat	90,07	50,00	59,76	65,92
21	Kalimantan Tengah	88,83	56,80	76,27	74,20
22	Kalimantan Selatan	88,78	55,31	46,78	61,94
23	Kalimantan Timur	90,31	62,01	87,94	80,87
24	Kalimantan Utara	93,79	52,22	87,94	78,98
25	Sulawesi Utara	92,41	45,48	59,45	65,15
26	Sulawesi Selatan	89,56	58,40	58,06	67,61
27	Sulawesi Tengah	92,98	62,59	83,89	80,23
28	Sulawesi Tenggara	90,01	50,55	74,67	72,03
29	Gorontalo	86,88	57,20	79,37	74,97
30	Sulawesi Barat	89,97	56,15	70,48	72,03
31	Maluku	88,72	57,56	89,17	79,55
32	Maluku Utara	92,38	53,61	86,61	78,44
33	Papua Barat	92,64	53,89	100,00	83,96
34	Papua	92,56	47,29	99,58	81,79
35	Indeks Nasional	86,56	52,62	62,00	66,55

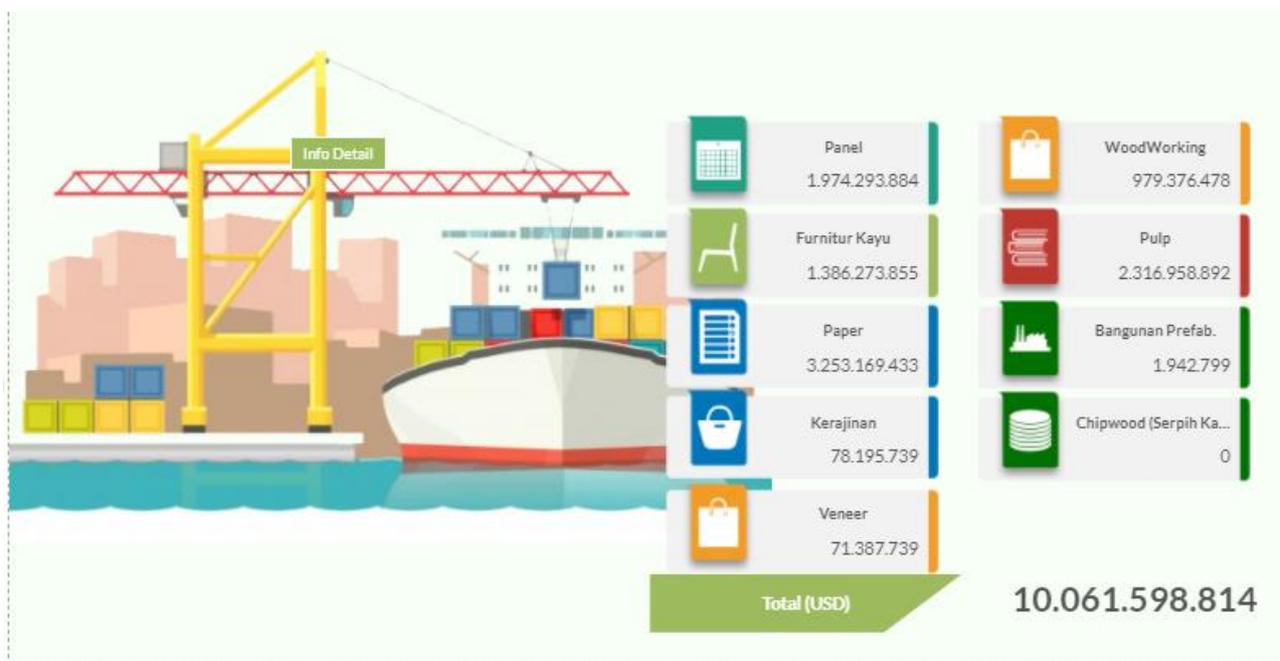
3.1.2 Sasaran Strategis 2

Meningkatnya manfaat dan kontribusi ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkelanjutan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki hutan tropis dengan keanekaragaman hayatinya yang sangat tinggi, berperan penting dalam menjaga stabilitas ekosistem global. Dalam kaitan itu, Pemerintah Indonesia melakukan pengelolaan hutan dengan tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi kayu semata, melainkan berkenaan pula dengan keseluruhan ekosistem hutan dengan beragam fungsinya. Tujuan pengelolaan hutan adalah untuk memberikan manfaat yang optimal, baik lingkungan, sosial maupun ekonomi bagi kehidupan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus berpartisipasi aktif dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim sebagai bentuk tanggung jawab global.

Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) terhadap PDB nasional berarti sumbangan sektor LHK yang berupa nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi lingkup sektor LHK di seluruh wilayah Indonesia. Kontribusi sektor LHK menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh BPS bahwa sektor LHK termasuk dalam sub sektor kehutanan yang merupakan salah satu entitas dalam kelompok lapangan usaha sektor pertanian.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama untuk kegiatan ini yaitu tercapainya peningkatan PDB Kehutanan Sebesar 1% dari tahun sebelumnya, Realisasi capaian tahun 2020 melebihi target persentase peningkatan nilai ekspor produk industri hasil hutan kayu sebesar 109% yakni senilai 10.061.598.814 USD dengan komoditi yakni Panel, Furnitur Kayu, Paper, Kerajinan, Veneer, Woodworking, Pulp, Bangunan Prefab, dan Chipwood (Serpih Kayu) seperti yang tergambar pada gambar :



Gambar 3. 2 Data Release Ditjen PHPL

Sumber: Data Release Ditjen PHPL, KLHK per 20 Desember 2020 diakses pada laman <http://phpl.menlhk.go.id/>

3.1.3 Sasaran Strategis 3

Terwujudnya tata kelola perhutanan yang baik dan berkelanjutan

Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan hutan yang telah ditetapkan tersebut, dilakukan monitoring dan pembaharuan data dan informasi tentang kawasan hutan setiap tahun. Demikian juga dengan kawasan hutan yang masih dalam proses usulan penetapannya, akan dilakukan kegiatan monitoring dan pembaruan (*updating*) data dan informasi, sehingga diharapkan pada saat kawasan hutan tersebut ditetapkan, tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga atau permasalahan yang timbul berkaitan dengan penetapan kawasan hutan tersebut. Kemudian, hasil monitoring dan pembaharuan data dan informasi kawasan hutan itu akan digunakan untuk menyamakan persepsi dengan instansi lain atau pihak lain yang berkaitan atau berkepentingan dengan kawasan hutan, antara lain Pemerintah Daerah, Badan Informasi Geospasial, Badan Pertanahan Nasional, masyarakat dan para pengelola kawasan hutan.

Pemanfaatan kawasan hutan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan dilakukan melalui program Perhutanan Sosial (PS). Penerapan kebijakan PS adalah mandat dari RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan merupakan salah satu program Pemerataan Ekonomi berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN). Kebijakan PS mendukung upaya pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Prinsip kebijakan PS adalah memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat penerima izin selama 35 tahun untuk memanfaatkan potensi sumber daya hutan melalui usaha *agroforestry*, *silvopastura*, *silvofisheries*, ataupun jasa lingkungan dengan tetap menjaga prinsip pengelolaan hutan lestari. Penerapan kebijakan PS ke depannya semakin diperkuat dengan disahkannya UU Cipta Kerja (UUCK) karena memuat pengaturan PS, sehingga akan semakin jelas arah dan orientasi untuk memajukan ekonomi dan melindungi usaha kelompok masyarakat penerima izin PS.

Program PS perlu mendapat perhatian serius Pemerintah karena realisasi pemberian izin akses PS masih jauh dari target yang ditetapkan. Pada periode 2015 – 2019 capaian PS baru tercapai 3,59 juta Ha atau 28,2% dari target 12,7 juta Ha. Target tersebut tetap dilanjutkan pada periode kedua RPJMN 2020 – 2024, sehingga pemerintah masih memiliki sisa target sekitar 9,1 juta Ha. Pada tahun 2020, target PS yang ditetapkan oleh Kementerian LHK seluas 125.000 Ha. Selama ini implementasi program PS mengalami banyak tantangan, antara lain: kurangnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dan belum adanya integrasi program dari *stakeholder* terkait yang mengakibatkan implementasi program PS belum menghasilkan output yang optimal karena dilakukan secara terfragmentasi. Dengan demikian, perlu percepatan yang dikoordinasikan oleh Kemenko Marves karena tidak hanya melibatkan peran multi sektor, namun juga berdampak luas pada masyarakat.

Dalam rangka mendorong percepatan realisasi program pemanfaatan kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial, rekomendasi kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Perhutanan Sosial yang akan fokus pada 2 (dua) strategi utama yaitu (a) percepatan pemberian izin akses dan (b) peningkatan kualitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
2. Penguatan kelembagaan Perhutanan Sosial lintas K/L di tingkat nasional melalui pembentukan Tim Percepatan Program Perhutanan Sosial (TP2PS) Nasional.
3. Penetapan lokasi *pilot project* dan *leading sector*-nya untuk program pemberdayaan masyarakat berbasis Perhutanan Sosial, secara

komprehensif dan terintegrasi. K/L yang ditetapkan sebagai *Leading sector* akan mengoordinasikan pihak terkait dalam pengembangan program PS di lokasi tersebut.

4. Melalui serangkaian proses koordinasi dan pengendalian kebijakan yang dijalankan oleh Kemenko Marves, sehingga pelaksanaan program pemanfaatan kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial pada tahun 2020 tercapai **409.934,5 Ha** atau 328% dari target 125.000 Ha.

Di masa mendatang, kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan menjadi salah satu basis dan potensi pembangunan kehutanan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan sampai dengan tahun 2030 ditempuh melalui upaya penyediaan 12,74 juta hektar untuk keperluan pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan skema-skema lainnya (RKTN 2010-2030). Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat diharapkan sampai dengan tahun 2030 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan di Indonesia, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan (*institutional sustainability*) pada tataran mikro dan makro. Pada tataran mikro, kelembagaan berkelanjutan pengelolaan kawasan hutan ditargetkan dengan meningkatkan program-program kemitraan sektor kehutanan di kawasan yang berbasis pada modal sosial (*social capital*) komunitas lokal. Pada tataran makro, sampai dengan tahun 2030 diwujudkan suatu kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan berkelanjutan yang dibangun dengan tidak hanya bertumpu pada pilar regulasi dan kepentingan ekonomi tetapi juga bertumpu pada pilar budaya dan pola pikir (*cultural cognitive*) yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

3.1.4 Sasaran Strategis 4

Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan

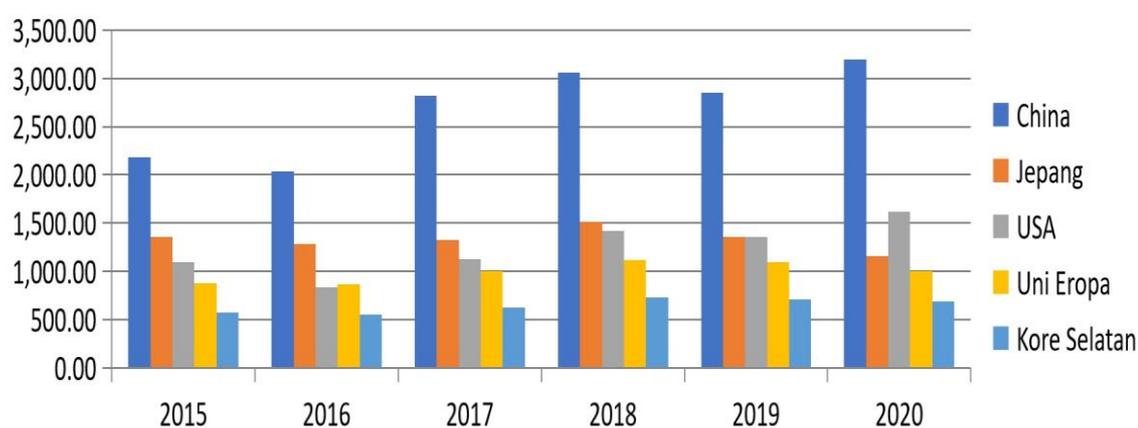
Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 4 ini dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan secara lestari dilaksanakan dengan strategi :

- a. Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan serta usaha kehutanan lainnya;
- b. Peningkatan ekspor hasil hutan (kayu dan non-kayu), TSL dan *Bioprospecting*;

- c. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan.

Pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan untuk meningkatkan perekonomian nasional, baik yang dilakukan oleh badan usaha pemerintah, pelaku usaha yang berorientasi bisnis maupun yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus tetap berprinsip pada pengelolaan hutan lestari.

Nilai ekspor produk kayu olahan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan nilai ekspor dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut :



TAHUN	China	Jepang	USA	Uni Eropa	Kore Selatan
2015	2.181,16	1.361,69	1.099,09	872,30	574,09
2016	2.034,54	1.284,64	836,85	868,85	550,75
2017	2.819,51	1.328,84	1.129,10	996,31	625,01
2018	3.059,39	1.509,72	1.415,27	1.115,25	734,63
2019	2.854,47	1.361,04	1.354,49	1.091,23	709,37
2020	3.190,56	1.152,99	1.620,40	1.001,45	689,90

Gambar 3. 3 Tabel. Perkembangan Nilai Ekspor Produk Kehutanan dalam 6 (enam) tahun terakhir (US\$ Juta)

Pada tahun 2020 Nilai Ekspor Produk olahan kayu dapat dirincikan sebagai berikut :

No	Jenis Produk	Nilai (US\$ Juta)
1	Panel	2.169,57
2	Furniture	1.539,94
3	Paper	3.543,89
4	Kerajinan	86,61
5	Veneer	80,81
6	Woodworking	1.076,61
7	Pulp	2.530,48
8	Bangunan Prefabrikasi	2,03
9	Chipwood (Serpil kayu)	50,45
	Total	11.080,41

Tercapai
119,78%
dari target 2020
sebesar
US\$ 9.250 juta

Gambar 3. 4 Tabel. Capaian Nilai Ekspor Produk Jasa Kehutanan
Sumber: KLHK

Terkait dengan ekspor produk hasil hutan kayu tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk terus menerapkan ketentuan SVLK sebagai suatu sistem untuk mendukung upaya pemberantasan pembalakan liar serta meningkatkan perdagangan kayu legal dalam seluruh produk kayu, termasuk untuk tujuan ekspor. Dalam hal ini pemerintah telah menerapkan kebijakan baru terkait dengan SVLK dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) agar mampu menembus pasar ekspor dengan menyediakan pembiayaan untuk sertifikasi dan penerbitan dokumen legalitas kayu.

Koordinasi yang telah dilakukan dengan Kementerian/Lembaga terkait telah membuahkan hasil dengan diterbitkannya Permendag Nomor 74/2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan mulai berlaku tanggal 25 Oktober 2020 dan telah disosialisasi perdana ke asosiasi industri kehutanan pada tanggal 20 November 2020 di Bogor. Serta diterbitkannya PermenLHK Nomor P.21/2020 terkait teknis pelaksanaan SVLK mulai berlaku tanggal 2 Desember 2020 yang juga telah disosialisasikan bersamaan Permendag Nomor 74/2020 pada 4 kota sentra usaha mikro kecil dan menengah yakni Jepara, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya tanggal 24-27 November 2020.

Beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam Meningkatkan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan yaitu :

1. Untuk lebih memastikan manajemen pengelolaan produk kehutanan terlaksana dengan baik, maka diperlukan regulasi pengawasan dan monitoring dari hulu ke hilir produk industri kehutanan.
2. Pengawasan dan monitoring dapat meningkatkan PNPB dari sektor kehutanan melalui tertib izin pemanfaatan hasil hutan.
3. Nilai dan jumlah ekspor produk industri kehutanan dapat ditingkatkan dengan regulasi yang mendorong peremajaan mesin plywood, dan perubahan alokasi kayu hutan alam dan kayu hutan tanaman.

3.1.5 Sasaran Strategis 5

Meningkatnya kualitas sumber daya air

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 5 (SS-5) yakni berkurangnya resiko penurunan fungsi lingkungan, meningkatkan kualitas ekosistem dan ketersediaan sumber daya air untuk kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan dengan strategi :

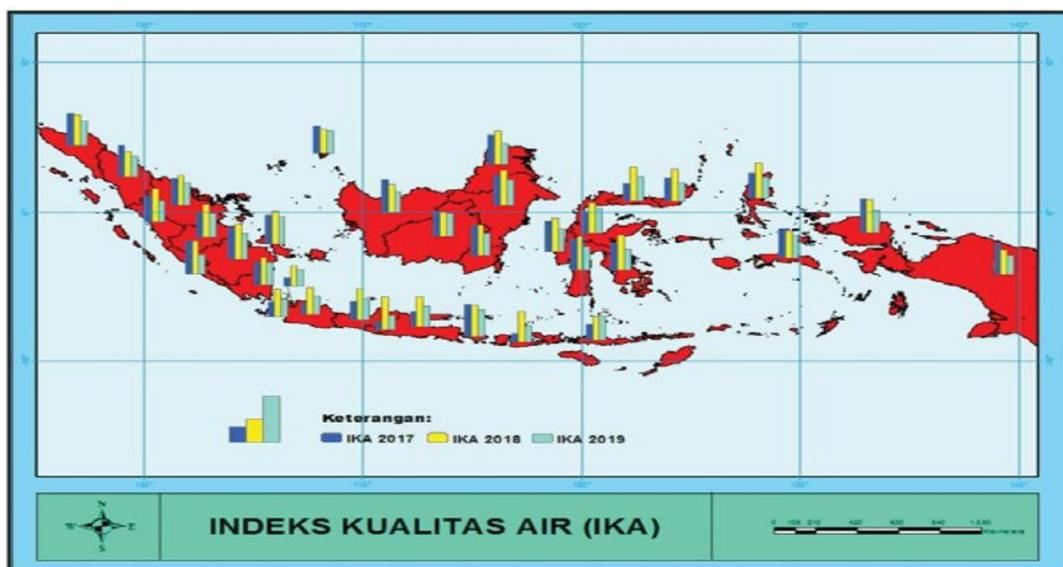
- a. Pengendalian pencemaran air;
- b. Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air;
- c. Peningkatan pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, spesies dan genetik;
- d. Peningkatan nilai tambah ekonomi kawasan hutan konservasi.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Dalam publikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2019 yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada bulan November 2020, tercatat bahwa nilai IKLH Nasional tahun 2019 mencapai 66,55 dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA)s sebesar 52,56; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 86,56; dan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

sebesar 62,99. Sementara IKLH Nasional Tahun 2018 mencapai 71,687 dengan nilai IKA sebesar 72,77; IKU sebesar 84,74; dan IKTL sebesar 61,03. Tampak bahwa kecuali kualitas air, terjadi perbaikan pada kualitas udara dan kualitas tutupan lahan. Perubahan nilai IKA yang besar ini bukan karena merosotnya secara drastis kualitas air daerah melainkan lebih karena berbedanya metode perhitungan yang digunakan tahun 2019 dengan tahun 2018.

Indeks Kualitas Air diukur dengan menggunakan 7 (tujuh) parameter yaitu DO, COD, BOD, Total Fosfat, TSS, Fecal Coliform dan Total Coliform pada wilayah hulu, tengah dan hilir dari 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang tersebar di 34 provinsi. Penentuan IKA yang hanya didasarkan pada pengukutan 15 DAS Prioritas tidak dapat dianggap mewakili kualitas air Indonesia, selain sungai, sumber daya air lainnya perlu diperhitungkan, seperti danau prioritas.



Gambar 3. 5 Peta Indeks Kualitas Air 2019

Disamping itu, Danau merupakan bagian dari ekosistem, sumber daya air, sumber air yang memiliki nilai ekonomis, ekologis, sejarah, budaya dan hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kondisi beberapa danau yang mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan daerah tangkapan air, smepadan danau, penurunan kualitas air, penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, peningkatan erosi/sedimentasi, pendangkalan, dan punahnya jenis biota endemi, yang menjadi ancaman bagi kelestarian fungsi danau dan mengakibatkan kerugian bagi kehidupan masyarakat.

Pada tahun 2008 telah disusun Pedoman Pengelolaan Ekosistem Danau yang dilanjutkan dengan peluncuran Grand Desain Penyelamatan Ekosistem Danau Indonesia atas dukungan Panja Danau Komisi VII DPR pada tahun 2012 dan pada tahun 2015-2019 implementasi penyelamatan 15 danau prioritas dikuatkan dengan Penyusunan Rencana Pengelolaan Danau.

Pengelolaan danau dan penyelamatan danau prioritas nasional hingga saat ini relative belum menjadi program penting dan penganggaran pun masih rendah. Rencana Pengelolaan Danau yang telah tersusun juga belum dijadikan pedoman panduan dalam penyusunan tata ruang wilayah ataupun program kegiatan wilayah danau.

Rancangan Perpres Danau Prioritas yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2017 dan telah melalui tahap pembahasan Antar Kementerian/Lembaga (PAK) serta Harmonisasi Perundangan pada tahun 2018-2019 diharapkan dapat selesai pada tahun 2020 namun terdapat beberapa kendala yang belum terselesaikan hingga berakhirnya tahun 2020. Terbitnya RPerpres ini akan sangat membantu dalam formulasi kebijakan koordinasi yang mampu mensinergikan program antar sektor untuk pemulihan ekosistem danau.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelamatan Danau Prioritas telah melalui rangkaian prosedur dan pembahasan lingkup K/L yang cukup panjang dan melelahkan namun belum dapat terselesaikan karena adanya usulan dari Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum terfasilitasi. Perpres ini perlu didorong untuk dapat segera diterbitkan karena urgensi penyelamatan danau prioritas nasional yang saat ini kondisinya terus mengalami kerusakan sedangkan upaya penyelamatannya belum terintegrasi dengan baik dan optimal

3.1.6 Sasaran Strategis 6

Terwujudnya efektifitas pengelolaan sampah

Sampah masih menjadi permasalahan pelik di Indonesia. Data tahun 2017 menunjukkan jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 65,8 juta ton/tahun (KLHK, 2017), dimana sekitar 14 % diantaranya merupakan sampah plastik dan 24% tidak terkelola dan dibuang langsung ke lingkungan. Jumlah sampah plastik yang masuk ke perairan dan terbawa sampai ke laut diperkirakan mencapai 620.000 ton pada tahun 2020 dan diprediksi menjadi 780.000 ton pada tahun 2025. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan semakin meningkatnya produksi dan penggunaan plastik, maka jumlah timbulan sampah akan semakin meningkat sehingga berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta berdampak buruk bagi kehidupan satwa dan kesehatan manusia.

Sebagai negara kemaritiman, Indonesia memiliki sumberdaya alam di dari sektor kelautan yang dapat dieksplorasi lebih luas untuk kepentingan bangsa, baik dari segi peningkatan serapan karbon, pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kesehatan, perikanan untuk perekonomian, minyak bumi, dan pariwisata. Sumber daya alam tersebut pada akhirnya sangat terancam untuk dieksplorasi ataupun eksploitasi karena adanya tumpukan sampah di laut yang mengakibatkan terganggunya ekosistem laut.

Dari beberapa kajian ditemukan bahwa kontribusi utama dari timbulan sampah dilaut adalah minimnya penanganan sampah di darat sehingga banyak aktivitas antroposentris yang membuang sampah ke perairan dan berakhir di laut. Jambeck (2015) memperkirakan sebesar 0,48 – 1,29 juta metrik ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya. Lebih lanjut, di World Bank (2018) menyebutkan bahwa 80% sampah di laut bersumber dari sampah yang dihasilkan di darat.

Pengelolaan sampah telah memiliki payung hukum yang kuat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menjamin hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, merupakan acuan utama bagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta aturan penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif bagi pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, pemerintah telah menerbitkan serangkaian peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah, yang mengatur mengenai kewajiban setiap pihak, dari penghasil sampah, pengelola kawasan, pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Serangkaian program insentif kepada daerah melalui pemberian Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan juga penghargaan melalui program adipura juga telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah oleh pemerintah.

Fakta yang muncul adalah banyak sampah yang dihasilkan dari aktivitas antroposentris di darat, tidak terkelola dengan baik sehingga berakhir di laut. Dari kondisi ini dapat terlihat bahwa penanganan sampah di laut tidak terlepas dari efektivitas penanganan sampah di darat agar memitigasi potensi kebocoran sampah di daratan yang dibuang ke laut. Untuk itu pemerintah di tahun 2018 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, yang secara tegas menetapkan target penanganan sampah di laut sebesar 70% di tahun 2025. Guna menjamin tercapainya target

nasional tersebut, Kemenko Marves perlu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pengelolaan sampah baik untuk sampah yang bersumber dari darat maupun yang di laut, guna memastikan pelaksanaannya dapat dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

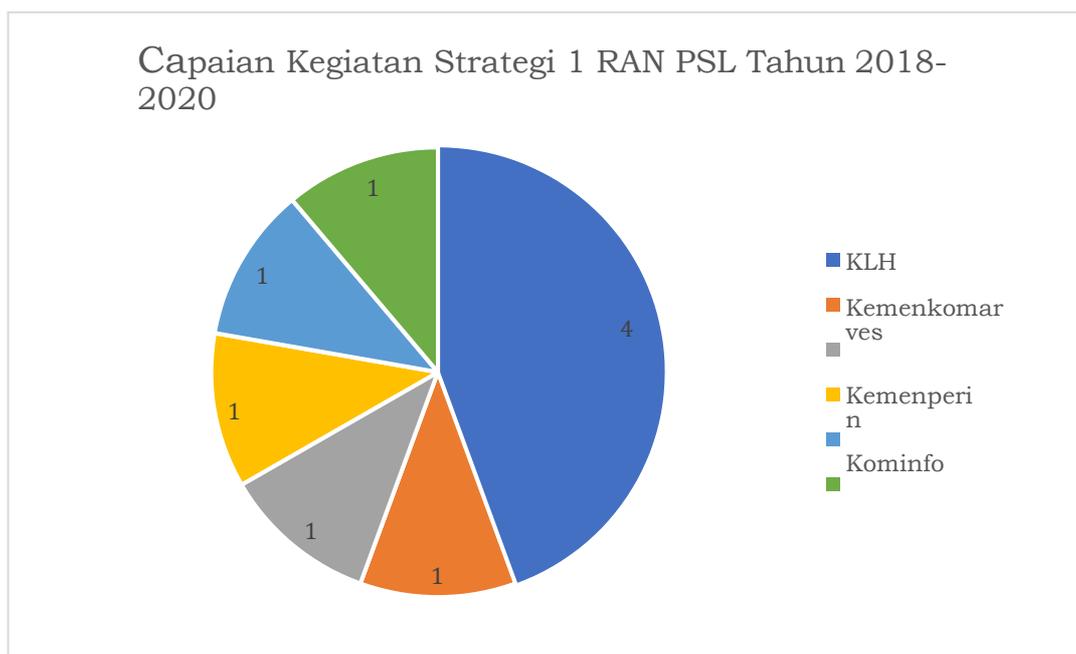
Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai instrument hukum pertama yang mengatur tentang persampahan, selanjutnya pada tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 97 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah. Langkah progresif juga telah dilakukan dengan mendorong terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 mengenai Penanganan Sampah Laut. Didalam kebijakan tersebut terdapat Rencana Aksi Nasional yang menjadi dasar untuk pengurangan sampah laut sebesar 70% dan penerapan pengelolaan sampah melalui 3R hingga 30% pada tahun 2025 dengan melibatkan 16 Kementerian dan Lembaga dengan 59 kegiatan. Berdasarkan pemantauan kegiatan sampai dengan tahun 2020, dari 59 kegiatan RAN PSL, terdapat 41 kegiatan atau 69% yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Strategi 1 Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan dengan 9 dari 12 kegiatan atau 75% telah dilaksanakan;
- b. Strategi 2 Pengelolaan Sampah yang Bersumber dari Darat dengan 11 dari 18 kegiatan atau 61% telah dilaksanakan;
- c. Strategi 3 Penanggulangan Sampah di Pesisir dan Laut dengan 13 dari 16 kegiatan atau 81% telah dilaksanakan;
- d. Strategi 4 Mekanisme Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum dengan 4 dari 7 kegiatan atau 57% telah dilaksanakan;
- e. Strategi 5 Penelitian dan Pengembangan dengan 4 dari 6 kegiatan atau 67% telah dilaksanakan.

Adapun untuk pencapaian setiap kelompok kerja adalah sebagai berikut :

KELOMPOK KERJA STRATEGI 1: GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN KESADARAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Koordinator: Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 3. 6 Capaian Kegiatan Strategi 1 RAN PSL di tahun 2018 – 2020

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan sampah laut, kementerian- kementerian yang tergabung dalam Kelompok Kerja 1 Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Nasional telah melaksanakan 9 dari 12 kegiatan yang diamanatkan dalam Perpres 83/2018. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melatih 1.751 kepala sekolah mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang di dalamnya terdapat materi mengenai pengelolaan sampah melalui Bimtek UKS dan SNP.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) telah mengadakan 38 kegiatan Peduli Lingkungan dan Kebersihan di lingkungan kementerian/lembaga, sekolah, dan kampus. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan kurang lebih 10.000 orang yang terdiri dari Pemerintah Daerah, siswa SD, SMP, dan SMA, dosen, mahasiswa, OASE Kabinet Kerja, Persatuan Istri Tentara (Persit), LSM, dan masyarakat umum.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melaksanakan 50 kegiatan sosialisasi mengenai bahaya sampah plastik seperti Ngaji Plastik di Kota Banjar, Jawa Barat, Seminar Nasional Sirkular Ekonomi Pengelolaan Sampah di Nusa Tenggara Barat, FGD Sinergi Pengelolaan Sampah di DKI dan Edukasi Peran Perempuan dalam Pengelolaan Sampah. Selain itu, KLHK juga mengadakan Pelatihan Operasional Pusat Daur Ulang di 11 kabupaten/kota. Di tahun 2019 dan 2020, KLHK membuat 19 program kolaborasi pengurangan sampah plastic, diantaranya Kolaborasi Pengurangan Sampah Unilever dan Saruga (Bulk Store) melalui penyediaan produk isi ulang Unilever, Program Penarikan Kembali sampah Botol PET Aqua Danone dengan memanfaatkan fasilitas penjemputan sampah oleh GRAB, dan Program Penarikan kembali kemasan Garnier (LOreal) dengan melibatkan Ritel Modern sebagai Drop Point. Di tahun 2020, KLHK juga menganugerahkan Penghargaan Upaya Pengurangan Sampah oleh Produsen yaitu Danone Aqua, Mc Donalds Indonesia, KFC Indonesia, dan Sate Khas Senayan.

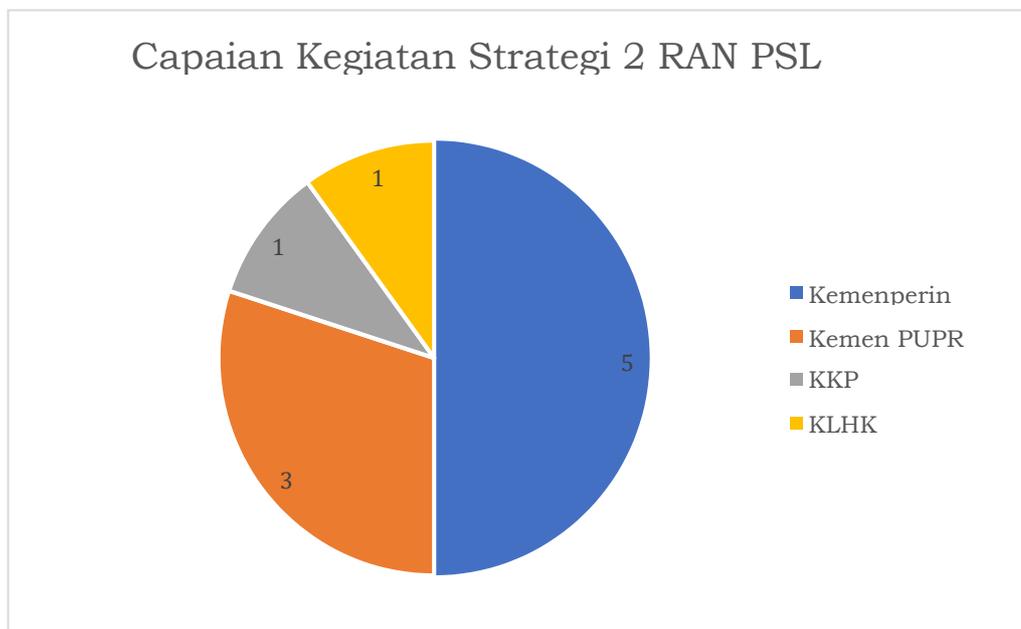
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan Sekolah Bahari Indonesia pada tahun 2019 di 9 lokasi yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Meranti, Kab. Belitung Timur, Kab. Kepulauan Seribu, Kab. Serang, Kota Palu, Kab. Bone, Kab. Lombok Utara, dan Kab. Bengkalis.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengadakan Bimbingan Teknis SDM Industri Daur Ulang Plastik Nasional bagi 20 pelaku daur ulang dan Pemerintah Daerah di bulan November 2019.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengadakan total 29 kampanye mengenai sampah laut sejak tahun 2018. Di tahun 2018, telah dilaksanakan Dialog Interaktif dengan tema "Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Ekonomi Produktif", Forum Diskusi Publik dengan tema: "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pesisir Melalui Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan", dan pemasangan media luar ruang/Billboard sebanyak 3 kali mengenai Tata Ruang Laut, Konservasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari. Di tahun 2019, Kominfo melakukan program Generasi Bijak Plastik untuk mendukung upaya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Program diikuti oleh > 1500 orang dan dilaksanakan di 10 kota.

KELOMPOK KERJA STRATEGI 2: PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERSUMBER DARI DARAT

Koordinator: Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Gambar 3. 7 Capaian Kegiatan Strategi 2 RAN PSL di tahun 2018 – 2020

Pengelolaan sampah yang bersumber dari darat difokuskan melalui 3 program utama, yaitu pengendalian sampah pada Daerah Aliran Sungai, pengendalian sampah plastik dari sektor industri hulu, dan pengendalian sampah plastik dari sektor industri hilir. Dari tahun 2018 – 2020, Kelompok Kerja Strategi 2 telah mengerjakan 11 dari 18 kegiatan yang diamanatkan dalam Perpres 83/2018. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan Kelompok Kerja Strategi 2 adalah:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Peraturan Menteri LHK Nomor

P.75 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah oleh Produsen, melibatkan pakar, narasumber, diskusi antar kementerian juga diskusi bersama produsen yaitu Manufaktur, Ritel dan Jasa Makanan- Minuman. KLHK juga berhasil melakukan penarikan sampah kembali oleh produsen dan melalui penolahan sampah di bank sampah. Dengan kolaborasi bersama Kementerian PUPR, ESDM, dan KKP, pada bulan Juli 2020, KLHK telah membangun tempat pengolahan sampah menjadi energi di Cilacap berupa fasilitas Refused Derived Fuel yang mengolah 120 ton sampah per hari menjadi 30- 40 ton briket sampah untuk bahan bakar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) pada tahun 2018 – 2020 telah membangun 167 TPS3R di Indonesia dan 2 prasarana pengambilan sampah di Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai. Kemen PUPR juga telah melakukan pemanfaatan limbah plastik untuk campuran aspal jalan dengan estimasi campuran limbah plastik yang digunakan sebanyak 2,5 - 5 ton/km jalan.

Kementerian Perindustrian telah mengembangkan SNI Recycling Content untuk Food Grade. Saat ini Kemenperin sedang menyusun Draft Pedoman Tata Cara Produksi PET Daur Ulang Untuk Kemasan Pangan Yang Baik Beserta dengan Peraturan Menteri Perindustriannya. Terkait industri daur ulang, saat ini terdapat 50 industri daur ulang di Indonesia yang telah melakukan investasi sebesar Rp2,63 triliun dan telah mempekerjakan lebih dari 20.000 orang.

Kementerian Keuangan telah menyelesaikan RPP cukai plastic yang saat ini tengah diharmonisasi, sebagaimana surat Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Keuangan nomor PPE.PP.03.01-294 tanggal 17 Februari 2020 perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik.

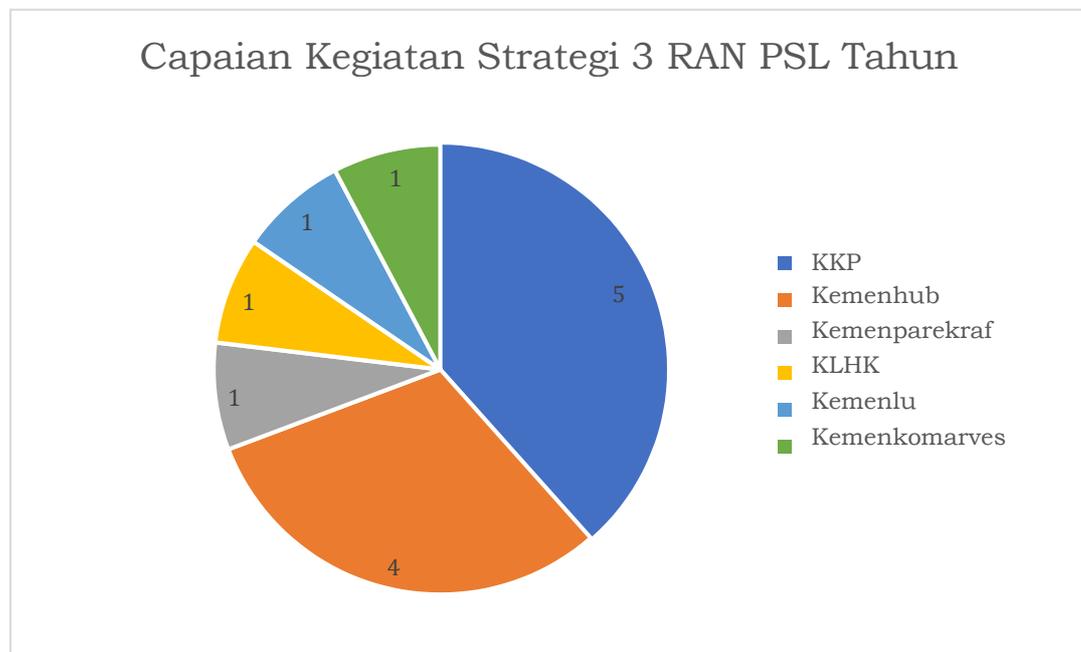
KKP dengan kolaborasi bersama Kemenkomarves dan KLHK telah melakukan pembersihan dan pengelolaan sampah di Citarum pada tahun 2018 dan di Cengkareng Drain dan Muara Sungai Gembong di tahun 2019.

Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi meluncurkan pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Bantar Gebang di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang pada tanggal 25 Maret 2019. PLTSa tersebut memiliki kapasitas pengolahan sampah sebanyak 100 ton/hari dengan output listrik (bruto) sebanyak 750 kWh.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengadakan kerjasama dengan British Plastic Waste Processing Company untuk pembangunan fasilitas Plastic to Fuel, dengan beberapa kota di provinsi tersebut yang akan difokuskan menjadi pilot project untuk pendirian fasilitas tersebut. Studi Kelayakan oleh British Plastic Waste Processing Company dengan total dana mencapai 280 Miliar Rupiah dijadwalkan akan dilakukan pada Bulan Agustus 2019 hingga Maret 2020, serta pada Maret 2020 dijadwalkan processing operation dapat dimulai dilakukan.

KELOMPOK KERJA STRATEGI 3: PENANGGULANGAN SAMPAH DI PESISIR DAN LAUT

Koordinator: Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan



Gambar 3. 8 Capaian Kegiatan Strategi 3 RAN PSL di tahun 2018 – 2020

Kelompok Kerja Strategi 3 mengenai Penanggulangan Sampah Di Pesisir dan Laut berhasil melaksanakan 13 dari 16 kegiatan. Kegiatan dalam kelompok kerja ini berfokus pada empat program yaitu Pengelolaan Sampah Plastik yang Berasal dari Aktivitas Transportasi Laut, Pengelolaan Sampah Plastik yang Berasal dari Kegiatan di Kawasan Wisata Bahari, Pengelolaan Sampah Plastik yang Berasal dari Kegiatan Kelautan dan Perikanan, dan Pengelolaan Sampah yang Berasal dari Aktivitas di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Capaian kegiatan pada Kelompok Kerja 3 antara lain:

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga tahun 2020 melakukan lima kegiatan terkait penanggulangan sampah di pesisir dan laut. Pertama, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana penanganan sampah di 2 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan 12 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Kedua, menerapkan sertifikasi manajemen lingkungan ISO 14000 untuk pengelolaan sampah dan limbah di 5 PPS dan di tahun 2020 ini akan dilakukan pula sertifikasi tersebut di PPN Kejawan. Ketiga, mengatur kegiatan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dalam Perdirjen Perikanan Budidaya Nomor 154/PER-DJPB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kawasan Akuakultur Dengan Pendekatan Ekosistem. Keempat, membangun fasilitas pengelolaan sampah berupa mesin press di 4 lokasi. Kelima,

menyelenggarakan Gerakan Nasional Bersih Pantai dan Laut di 22 lokasi, di antaranya di Makassar, Padang Galak, Labuan Bajo, Kuta, Raja Ampat, dan Manado.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya mengurangi sampah laut melalui kegiatan- kegiatan pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut. 3.369 kapal di tahun 2018 dan 3.610 kapal di tahun 2019 sudah memiliki Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran, yang berarti kapal-kapal tersebut telah mengimplementasikan Permenhub Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan melakukan sosialisasi tata cara pengelolaan sampah bagi penumpang oleh awak kapal saat kapal akan berlayar. Kemenhub juga telah membangun sarana dan prasarana *reception facility* dan menerapkan sertifikasi manajemen lingkungan internasional ISO 14001 untuk pengelolaan sampah dan limbah di 5 pelabuhan perikanan yaitu PPS Nizam Zachman Jakarta, PP Bungus, PPN Sibolga, PPS Kendari and PPS Bitung.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menyelesaikan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 5 Tahun 2020 tentang Penanganan Sampah Plastik di Kawasan Wisata Bahari, dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Petunjuk Teknis/ Juknis Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari yang saat ini sedang dikerjakan.

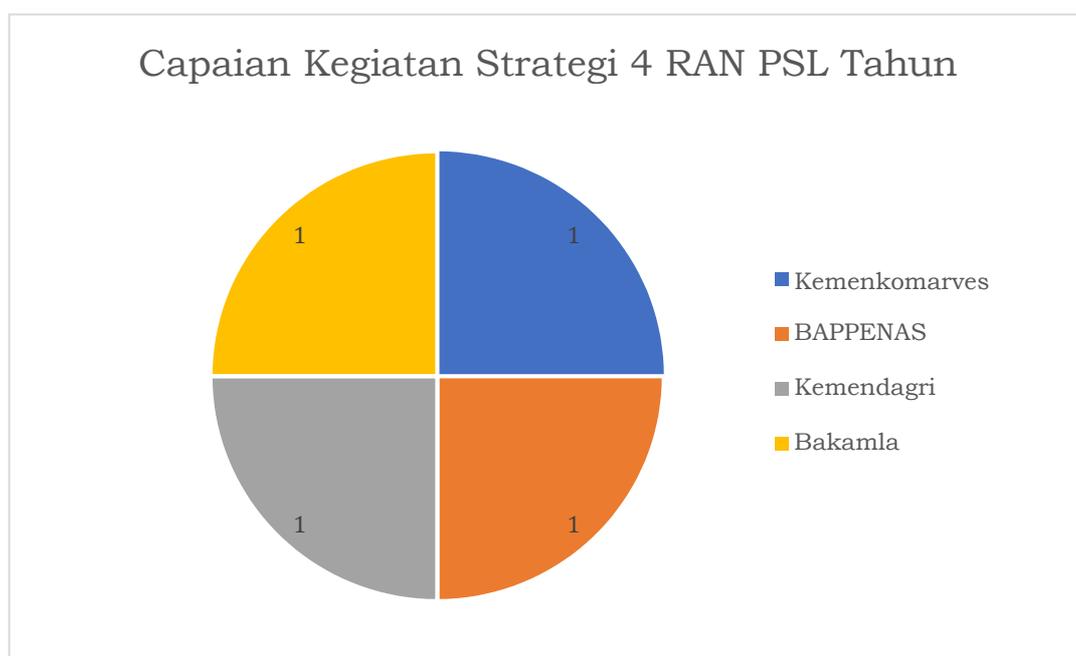
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah membangun kerja sama internasional terkait penanggulangan sampah plastik di laut melalui adopsi Resolusi UNEA 4 - Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities dan Resolusi Sidang Komisi UNESCAP ke 76 - Strengthening Cooperation to Promote the Conservation and Sustainable Use of the Oceans and Seas and Marine Resources for Sustainable Development in Asia and the Pacific serta peluncuran dokumen Transformation for a Sustainable Ocean Economy.

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) sampai dengan tahun 2020 telah menyelenggarakan 49 aksi bersama pembersihan sampah plastik di pesisir dan pulau- pulau kecil di seluruh Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun Pusat Daur Ulang di Karimun Jawa dalam rangka pengembangan sarana dan prasana pengelolaan sampah plastik di area wisata bahari. Terkait dengan pengelolaan sampah plastik di area wisata bahari, Kementerian PUPR di tahun 2021 akan menyelesaikan peningkatan TPA Pengengat di Nusa Tenggara Barat dan pembangunan pengelolaan sampah proses termal di TPA Warloka, Nusa Tenggara Timur.

KELOMPOK KERJA STRATEGI 4: MEKANISME PENDANAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENGAWASAN, DAN PENEGAKKAN HUKUM

Koordinator: Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan



Gambar 3. 9 Capaian Kegiatan Strategi 4 RAN PSL di tahun 2018 – 2020

Kelompok Kerja Strategi 4 berkontribusi dalam penanganan sampah laut melalui Diversifikasi Skema Pendanaan di Luar APBN/APBD, Penguatan Kelembagaan, dan Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Pelaksanaan Penegakan Hukum. Di tahun 2018 – 2020, dari tujuh kegiatan yang menjadi tugas kelompok kerja ini, empat telah terlaksana, yaitu:

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) mendorong skema pendanaan pengelolaan sampah plastik melalui Kerja Sama Pemeintah Swasta (KPS), hibah Corporate Social Responsibility (CSR), dana masyarakat, dan sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi dari kegiatan tersebut adalah dibentuknya tim lintas kementerian untuk membahas biaya retribusi

pengelolaan sampah, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melaksanakan pembinaan umum di daerah terkait pengelolaan sampah plastik melalui penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mencantumkan kegiatan pengelolaan sampah sebagai salah satu program prioritas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang mencantumkan arah kebijakan pembangunan daerah terkait dengan pengelolaan sampah sebagai salah satu program prioritas.

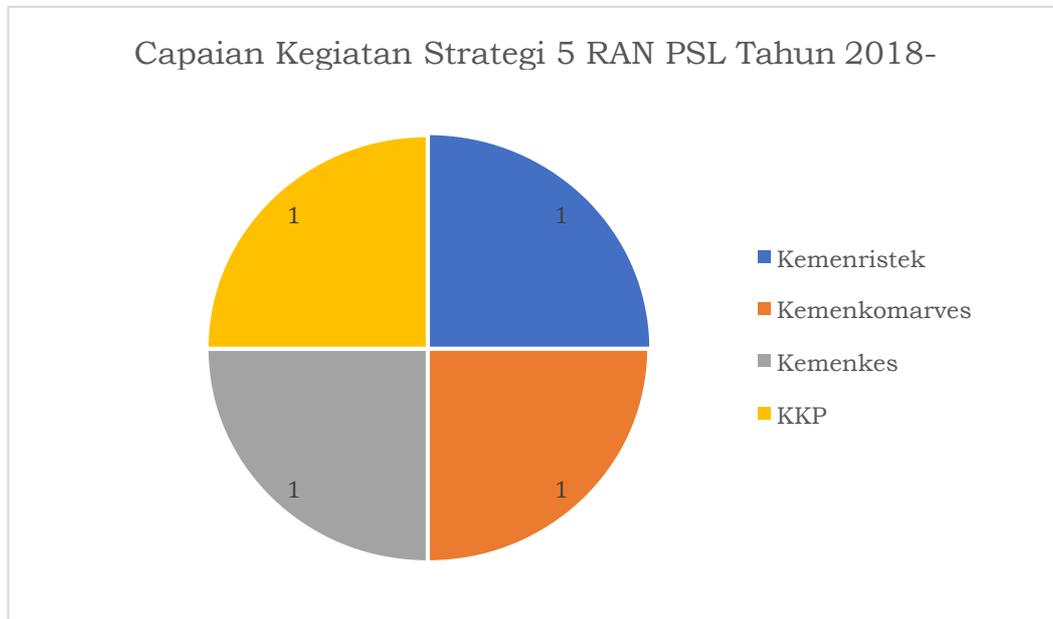
Selain itu, Kemendagri juga menerbitkan SE Nomor 440/7943/SJ tanggal 14 Agustus 2019 tentang Dukungan Pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan SE Nomor 440/9149/SJ tanggal 9 September 2019 tentang Dukungan Untuk Mewujudkan Indonesia Bersih kepada 34 provinsi. Saat ini, tengah dilakukan penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) telah mendorong komitmen eksekutif, baik di pusat maupun di daerah, untuk memprioritaskan alokasi anggaran di sektor pengelolaan sampah plastik. Realisasi dari kegiatan ini terlihat dari penyantunan kebijakan mengenai penanganan sampah laut telah tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 pada prioritas nasional nomor 6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan juga diprioritaskan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) melaksanakan 30 kegiatan Operasi Pemantauan Pencemaran Laut di tahun 2018 – 2019. Bakamla memiliki program Desa Maritim yang di dalamnya terdapat kegiatan pembinaan-pembinaan, salah satunya tentang penanganan sampah, yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Selain itu, Bakamla mengikuti Operasi 30 Hari di Laut yang diinisiasi oleh Interpol. Saat ini, Bakamla mengembangkan pusat pengaduan “Laut Nusantara”, dimana di dalamnya terdapat informasi mengenai pencemaran laut.

KELOMPOK KERJA STRATEGI 5: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Koordinator: Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi



Gambar 3. 10 Capaian Kegiatan Strategi 5 RAN PSL di tahun 2018 - 2020

Kelompok Kerja Strategi 5 bertugas untuk memacu inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan. Sampai dengan tahun 2020, telah Kelompok Kerja Strategi 5 telah melaksanakan 4 dari 6 kegiatan yang menjadi tugas kelompok kerja ini.

Kementerian Riset dan Teknologi telah mendorong penemuan 45 bahan pengganti plastik dengan bahan ramah lingkungan melalui berbagai penelitian di perguruan tinggi. Untuk kegiatan tersebut, Kemenristekdikti melakukan pemberian insentif penelitian mengenai sampah laut dan riset plastik sebanyak 116 judul penelitian dengan jumlah total pendanaan sebanyak Rp10.199.857.362 selama periode 2017 – 2019 dan program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (INSINAS) mengenai penelitian bioplastik sebanyak 21 judul penelitian dengan total pendanaan sebesar Rp3.512.490.000 dari tahun 2015-2019.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi didukung oleh Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut telah mengembangkan Sistem Pelaporan Pencapaian RAN PSL untuk memantau *progress* yang dibuat kementerian/Lembaga Tim Pelaksana RAN PSL dalam penanganan sampah laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan Riset Keamanan Produk Perikanan Dari Cemaran Marine Debris (Mikroplastik) di Tanjung Balai Asahan, Teluk Jakarta dan Tarakan di tahun 2018. KKP juga melakukan riset Kajian Kerentanan Pesisir akibat Sampah Laut di Banda Aceh dan Kajian risiko keamanan produk perikanan di Cirebon dari cemaran mikroplastik di tahun 2019.

Kementerian Kesehatan melalui Badan Penelitian dan Pengembangannya pada 18 April 2019, telah menyelenggarakan Seminar Sehari Dampak Paparan Mikroplastik terhadap kesehatan dan telah memulai melakukan kajian dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia.

Kementerian Perindustrian selaku salah satu anggota dari Kelompok Kerja Strategi 5 berkontribusi dalam penyusunan SNI produk plastic yang mudah terurai dan dapat didaur ulang. Saat ini, Standar Nasional Indonesia produk plastic yang mudah terurai dan dapat didaur ulang yang tengah disusun yaitu SNI 8424: 2017 untuk Resin (PET) Daur Ulang.

Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam Renstra BATAN 2020-2024nya telah mencantumkan bidang riset prioritas terkait penanganan sampah dan sampah laut yaitu komposit serat selulosa sebagai bahan pembuatan komposit plastic, *Radiotracer* mikroplastik, dan radioekologi akuatik.

Pada tahun 2020, LIPI telah menyusun penghitungan timbulan sampah di laut sebagai *baseline marine debris* sebesar 0,48 – 1,29 kton/tahun, yang merupakan rangkaian dari penghitungan timbulan sampah di tahun sebelumnya (2018). Selanjutnya pada tahun 2020, tim TKN PSL telah melakukan koordinasi penyusunan baseline versi 2 sebesar 521.540 ton.

Hal ini memberikan titik terang bagi pemerintah untuk mulai menghitung tingkat, status, proyeksi dan kecenderungan timbulan sampah di laut, yang selanjutnya akan digunakan sebagai baseline dalam melakukan perbandingan atas capaian kinerja penanganan sampah di laut. Selanjutnya baseline ini akan disempurnakan dengan versi selanjutnya, disertai dengan perhitungan pengurangan setiap tahunnya. Untuk itu pengendalian kebijakan penanganan sampah di laut sangat membutuhkan peran aktif berbagai sektor dan keaktifan serta strategi implementasi yang semakin efektif kedepannya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masing – masing Kementerian/Lembaga sehingga pada tahun 2020 dapat mendorong pengelolaan sampah di Indonesia melalui koordinasi dan implementasi intervensi teknologi seperti plastic *tar road*, RDF serta pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan kegiatan lainnya, dapat berkontribusi dalam penanganan sebesar 69% sampah di Indonesia.

Dari hal tersebut, di rekomendasikan upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

- Mendorong implementasi pengenaan cukai pada produk plastik
- Mendorong implementasi road map pengurangan sampah dari produsen
- Percepatan Implementasi inovasi dan teknologi pengelolaan sampah seperti RDF, PSEL, dan lain sebagainya
- Mendorong penerbitan peraturan Menteri Dalam Negeri retribusi sampah pada pengelolaan persampahan dan kebersihan
- Meningkatkan kerjasama dalam daur ulang sampah plastik melalui Minderoo Foundation, NPAP, dan lainnya.
- Mendorong investasi sebesar 7,15 Triliun agar menambah jumlah industri daur ulang dan meningkatkan kemampuan daur ulang sampah sebesar 33% pada 2040.

3.1.7 Sasaran Strategis 7

Terwujudnya efektifitas, kesiapsiagaan dan ketahanan kebencanaan

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis 7 (SS-7) yakni meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, kesiapsiagaan dan ketahanan kebencanaan, dilaksanakan dengan strategi :

- a. Pengendalian dan mitigasi perubahan iklim;
- b. Pengurangan risiko dan penanganan bencana terhadap laju penurunan tanah;
- c. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA);
- d. Pemulihan pasca bencana daerah terdampak;
- e. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana.

Sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, salah satu tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Bidang kebencanaan memiliki lingkup penanganan yang sangat komprehensif dan melibatkan multi sektoral. Sesuai amanat dalam UU No. 24/2007, penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan membutuhkan partisipasi semua pihak.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kerentanan akan bencana yang cukup tinggi akibat ciri khas geografis dan demografisnya. Secara geografis letak Indonesia berada pada pertemuan lempeng bumi serta lintasan gunung api aktif. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia berpotensi dan rawan akan bencana seperti letusan gunung api, gempabumi, tsunami yang kerap kali menimbulkan kerusakan dan jumlah korban dalam skala besar. Seiring berjalannya waktu meningkatnya aktivitas manusia yang secara

tidak langsung menyebabkan kerusakan lingkungan ditambah dengan fenomena perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim sehingga mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan kerap mendominasi kejadian bencana setiap tahunnya.

Untuk mempersiapkan menghadapi ancaman bencana dan tantangan mengurangi risiko bencana di masa mendatang dan sejalan dengan tujuan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SF-DRR) 2015-2030 tersebut, Pemerintah Indonesia secara aktif dan terus menerus menerapkan upaya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunannya baik tingkat nasional maupun daerah.

Dalam kaitannya dengan tingkat capaian indeks risiko bencana di wilayah Negara Indonesia, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan penilaian tentang Indeks Risiko Bencana Indonesia secara periodik dan terakhir dilakukan penilaian pada tahun 2019 dengan capaian indeks IRBI sebesar 132,69. Kajian Risiko Bencana & Pengukuran Indeks Risiko Bencana nasional pada setiap periode tertentu dihasilkan berdasarkan Kajian Kapasitas Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang disusun oleh setiap daerah secara periodik. Perhitungan IRBI Tahun 2020 lazimnya dilakukan setelah tahun berjalan. BNPB baru bisa melakukan analisis dan penilaiann setelah terlebih dahulu menerima keseluruhan laporan hasil kajian berupa IKD setiap daerah.

Penanggulangan bencana tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pembangunan nasional, dimana aspek pembangunan yang diselenggarakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengintegrasikan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang melibatkan multisektoral. Dengan demikian, diperlukan koordinasi secara sistematis dalam rangka meningkatkan pemahaman dan komitmen diantara seluruh *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana terutama upaya pengurangan risiko bencana.

Adapun kegiatan yang telah terselenggara dalam rangka meningkatkan koordinasi upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan pemulihan pasca bencana dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah selama tahun 2020 adalah rapat koordinasi lintas K/L dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana di pusat antara lain dengan mengadakan Simulasi Penanganan Banjir di DKI Jakarta melalui Tactical Floor Game (TFG). Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sinergitas dan kesiapsiagaan seluruh K/L Pusat dalam menghadapi bencana banjir di wilayah DKI Jakarta.



Gambar 3. 11 Rapat Koordinasi Antisipasi Bencana

Upaya pelaksanaan pengurangan risiko bencana difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana. Kegiatan – kegiatan koordinasi upaya perencanaan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah pusat difokuskan pada ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Masyarakat diharapkan akan memiliki kemampuan dan kapasitas sebagai *first responder* terhadap bencana sekaligus memiliki daya lenting untuk memulihkan diri ketika terdampak bencana. Beberapa kegiatan koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dalam rangka menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana yang terdiri dari peningkatan kapasitas serta mengembangkan kesiapsiagaan terhadap bencana di daerah.

Bencana yang terjadi pada akhir tahun 2004 ditandai dengan terjadinya gempa bumi yang sangat dasyat di Aceh yang menimbulkan tsunami sangat hebat yang membawa korban jiwa dan orang hilang lebih dari seperempat juta di wilayah sekitar India. Tragedi kemanusiaan akhir tahun tersebut mendapatkan tanggapan luar biasa dari masyarakat Indonesia dan dunia, baik dalam upaya untuk memberikan bantuan bagi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara yang terkena musibah maupun usaha untuk mengurangi dampak bencana tsunam di waktu mendatang, tidak hanya di wilayah Aceh namun seluruh wilayah Indonesia. Usaha dimaksud adalah dengan pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia atau Indonesia Tsunami Early Warning System yang disingkat InaTEWS. Mengingat sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami mempunyai peran strategis dan penting untuk mengantisipasi serta memitigasi sehingga perlu dilakukan upaya penguatan dan pengembangan yang berkelanjutan guna meningkatkan keselamatan jiwa dan harta masyarakat Indonesia dari gempa bumi dan tsunami maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami. Pengawasan terhadap implementasi Perpres tersebut menjadi fokus Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Investasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dimasa mendatang dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana beberapa hal yang direkomendasikan yaitu :

1. IRBI yang disusun dan dinilai secara periodik oleh BNPB merupakan representasi hasil dari penilaian keseluruhan hasil Kajian Risiko Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang dimiliki setiap daerah sekaligus merupakan gambaran terhadap potret kondisi capaian program penurunan risiko bencana secara nasional.
2. Kajian Risiko Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang disusun setiap daerah dinilai penting oleh karena itu perlu dukungan pengalokasian anggaran dari APBD masing-masing khususnya bagi daerah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang relatif tinggi.
3. Dalam kaitannya dengan program penurunan risiko bencana, keberadaan InaTEWS dinilai sangat penting untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan oleh bencana Tsunami dan Gunung Berapi sehingga dalam implementasinya Perpres 93 Tahun 2019 ini perlu didukung oleh semua pihak baik pemerintah maupun Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
4. Realisasi Pembangunan sistem InaTEWS harus dilanjutkan hingga pada titik pemenuhan yang optimal dengan memprioritaskan pada daerah yang memiliki tingkat kerentanan bencana yang relatif tinggi.



Gambar 3. 12 Mekanisme Kerja Sistem Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS)

Disamping itu, Indonesia merupakan negara terbesar dalam cadangan

karbon, dengan nilai simpanan karbon setara 33 Gigaton karbon (20% dari mangrove dunia). Indonesia memiliki lahan gambut tropis terbesar dan terpadat di dunia dengan nilai simpanan karbon sekitar 55 Gigaton (37% dari simpanan karbon di seluruh dunia). Indonesia juga merupakan rumah bagi hutan hujan tropis dengan luasan ketiga terbesar di dunia (125,9 juta ha) dan karbon yang dihasilkan setara 25,18 Gigaton.

Selain itu, Indonesia telah memiliki cukup pengalaman dalam perdagangan karbon, baik secara global maupun bilateral. Pada saat ini telah berlangsung beberapa kegiatan terkait Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia antara lain Proyek *Clean Development Mechanism* (CDM) (dengan 202 proyek bidang kehutanan dan listrik geothermal), pola *Verified Carbon Standard*, dan *Joint Credit Mechanism* pada proyek bilateral Jepang. Namun hal ini belum didukung payung hukum yang cukup mengatur mekanisme oleh Pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan pengaturan mengenai kredit karbon guna dapat dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan pencapaian target NDC atau emisi yang harus diturunkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan konvensi perubahan iklim yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut untuk mencapai target NDC tersebut, telah disiapkan Rancangan Perpres Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional. Maksud Rperpres ini adalah untuk efisiensi dan optimalisasi sumber daya agar memberikan dampak yang positif bagi pengguna dan para pihak.

Rperpres ini perlu didorong sesegera mungkin. Diharapkan dengan adanya Rperpres terkait NEK ini dapat mendorong pengurangan emisi karbon dengan cara yang paling efektif dan efisien, termasuk untuk menyediakan pendanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pencapaian target NDC, melalui perdagangan karbon, pajak karbon, pembayaran berbasis kinerja, dan mekanisme lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapasitas nasional. Dalam pelaksanaannya, NEK akan dilakukan di semua sektor yang tercakup dalam NDC, yaitu : energi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, pertanian, kehutanan, dan sektor lainnya.

Lebih lanjut, sektor kelautan juga menjadi perhatian dari Indonesia. Laut sendiri, memegang peranan penting antara lain sebagai potensi penyerapan karbon oleh ekosistem mangrove dan lamun, dan peluang penting dalam UNFCCC terkait keterkaitan substantif antara laut dan perubahan iklim serta memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi.

Selain itu, dampak perubahan iklim juga akan memperburuk kondisi sosial ekonomi di sekitar 10.000 desa pesisir. Isu perubahan iklim global dengan berbagai dampaknya mengancam investasi, sarana, dan prasarana di

kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Upaya-upaya adaptasi perubahan iklim sudah banyak dilakukan di Indonesia, terutama terkait dengan resiliensi masyarakat pesisir seperti nelayan, wisata bahari dan penggunaan solusi *hybrid* untuk perlindungan pantai. Upaya mitigasi, terutama apabila dikaitkan dengan pengertian bahwa mitigasi adalah aksi pengurangan emisi, masih berjalan lambat dan belum sepenuhnya diimplementasikan. Sehubungan dengan pentingnya isu kelautan dalam perubahan iklim, maka perlu disusun roadmap mengenai kelautan. Proses tersebut terus berjalan, beberapa kegiatan yang telah dilakukan tersebut yaitu :

1. Mempersiapkan kebijakan terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK)

Sesuai arahan Presiden pada rapat kabinet terbatas (ratas) pada tanggal 6 Juli 2020 bahwa draft RPerpres NEK agar segera diselesaikan mengingat aturan kebijakan NEK atau *carbon pricing* ini untuk mendukung upaya penanggulangan perubahan iklim yang sedang dilakukan Indonesia bersama masyarakat dunia.

Perdagangan karbon diupayakan untuk memenuhi komitmen Indonesia kepada internasional sesuai konvensi perubahan iklim yang telah diratifikasi, untuk pencapaian NDC sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan kerja sama luar negeri pada tahun 2030.

Dalam prosesnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyusunan RPerpres Penyelenggaraan NEK untuk Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional, dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut RPerpres NEK, untuk membahas mengenai RPerpres NEK-NDC dan IGRK PRK sesuai dengan arahan dari Presiden agar dapat segera diselesaikan dengan dilakukan penyempurnaan dan simplifikasi sehingga mudah diimplementasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat. Pada pertemuan tersebut disepakati penyusunan RPerpres NEK NDC dan RPerpres Instrumen Pengendalian Gas Rumah Kaca Nasional dan Pembangunan Rendah Karbon (IGRK-PRK) semula dilakukan secara parallel dan terpisah. Namun mengingat substansi kedua RPerpres tersebut saling terkait maka untuk efisiensi dan implementasi dilakukan penggabungan kedua RPerpres tersebut.
- b. Rapat Konsultasi RPerpres NEK dengan Kementerian/Lembaga terkait. Rapat ini menghasilkan masukan dari K/L terkait antara

- lain: RPerpres penggabungan IGRK-PRK dengan NEK-NDC telah mengakomodir beberapa aspek penting: aksi mitigasi dan adaptasi, pengaturan pelaksanaan NEK, pembagian manfaat, NDC, dan PRK; dan perlu dipertimbangkan skema setelah NDC 2030 telah berjalan. turunan dari RPerpres harus jelas sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah pusat dan daerah.
- c. Rapat Konsultasi Publik tentang Rperpres NEK dengan Non Kementerian/Lembaga terkait. Rapat ini mencatat, antara lain: Penyempurnaan Mekanisme Penyelenggaraan NEK, terkait perdagangan karbon dan mekanisme RBP; perlu sosialisasi upaya mitigasi dan capaiannya kepada masyarakat; perlu *exercise* perhitungan capaian target NDC dan besaran emisi karbon yang dapat diperdagangkan (domestik dan internasional) agar pelaku NEK mendapatkan manfaatnya.
 - d. Rapat Koordinasi Trilateral antara Kemenkomarves, KLHK, dan Bappenas sebagai koordinasi progres penelaahan RPerpres NEK. RPerpres NEK ini diharapkan dapat mengelola kebutuhan dan harapan publik dengan memberikan landasan hukum bagi NDC Indonesia dan instrument NEK yang dapat mendukung upaya pencapaian target NDC.

2. Mempersiapkan kebijakan penyusunan roadmap isu laut (ocean) dalam perubahan iklim

Memperhatikan pentingnya isu laut dalam perubahan iklim, antara lain sebagai potensi penyerapan karbon dan peluang penting dalam UNFCCC dalam peranannya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi, maka perlu disusun roadmap mengenai kelautan.

Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan telah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembahasan kriteria roadmap mengenai isu laut (*ocean*) dalam perubahan iklim untuk memetakan kegiatan aksi adaptasi dan mitigasi nasional, sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Draft Roadmap terkait isu laut (ocean) dalam adaptasi dan mitigasi nasional untuk perubahan iklim

No.	Kegiatan	Target
Adaptasi		
1.	Roadmap NDC ADAPTASI – KLHK <ul style="list-style-type: none"> Sektor Kelautan dan Pesisir dikaji dalam sektor Ekosistem (Mangrove, Lamun, Terumbu Karang) 	
2.	National Adaptation Plan (RAN API) – Bappenas <ul style="list-style-type: none"> Kerentanan Wilayah Pesisir Keselamatan Pelayasran 	
3.	KKP <ul style="list-style-type: none"> Program Kawasan Pesisir Tangguh 	
4.	Perikanan Skala Kecil (LSM dll) <ul style="list-style-type: none"> Perikanan skala sedang Perikanan skala besar 	<i>Fisheries Resilience</i>
Mitigasi		
5.	Pembangunan Rendah Karbon <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan metodologi dan kontribusi perhitungan penurunan emisi yang berasal dari mangrove Input data ekosistem mangrove ke dalam AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemanfaatan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia) Rehabilitasi Mangrove (Target 2020: 5000ha, 2024: 50.000ha) 	<i>Blue Carbon</i>
6.	Rehabilitasi ekosistem pesisir (terumbu karang)	
7.	Pemanfaatan energy terbarukan	
8.	Pengalihan bahan bakar kapal	

3.1.8 Sasaran Strategis 8

Terwujudnya efektifitas rancangan kebijakan Di Bidang pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien

Sebelum rekomendasi kebijakan dihasilkan, maka disiapkan rancangan kebijakan sebagai bagian dari proses pencapaian kinerja yang masuk dalam sasaran strategis ke delapan. Jumlah rancangan kebijakan yang ditargetkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 50% dari rancangan rancangan kebijakan dengan capaian seperti disajikan dalam tabel berikut:

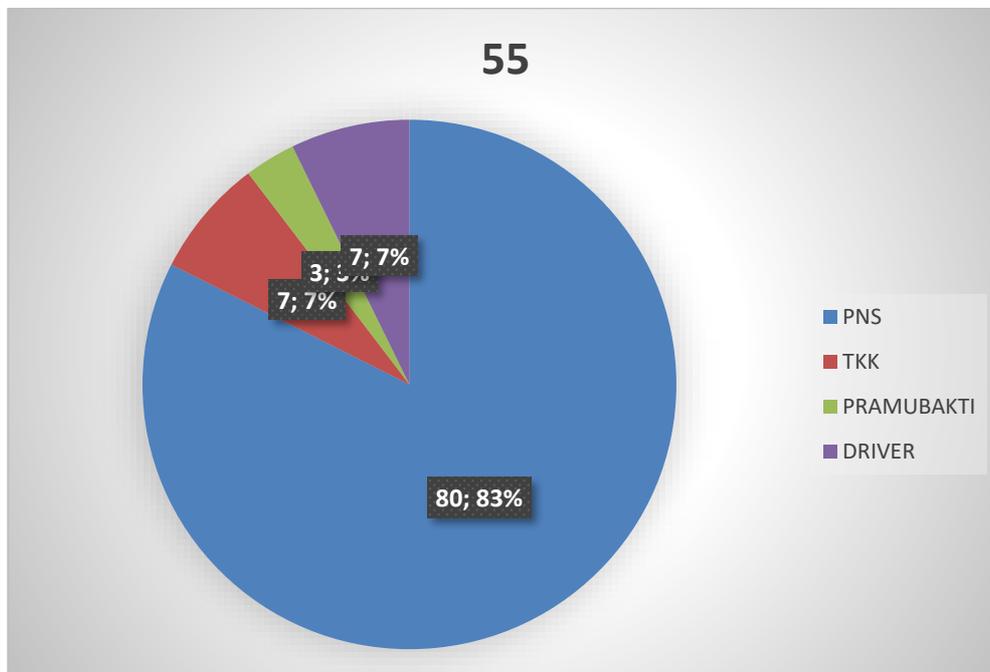
Tabel 3. 5 *Internal Bisnis Perspective*

Internal Bisnis Perspective				
SS.8	Terwujudnya efektifitas rancangan kebijakan Di Bidang pengelolaan lingkungan & kehutanan yang efektif dan efisien	8	Persentase Rancangan Kebijakan yang diterbitkan	50%
		9	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang dilaksanakan	50%

Rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan costumer perspective berasal dari rancangan kebijakan yang dihasilkan pada level deputy (internal process) sebanyak 50% dari 5 rancangan kebijakan. Dari empat kebijakan yang diperjanjikan, terlaksana sebesar 100% pada tahun 2020. Berdasarkan kebijakan tersebut, dirumuskan Rekomendasi Kebijakan sebagai berikut:

3.1.9 Sasaran Strategis 9
Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya hingga tahun 2020 didukung oleh 55 orang pegawai. Terdiri dari 38 PNS dan 7 Tenaga Kerja Kontrak (TKK), 3 Pramubakti dan 7 driver, dengan komposisi sebanyak 31 pegawai Laki-laki dan 24 Pegawai Perempuan, seperti tergambar pada diagram berikut :



Gambar 3. 13 Diagram Pegawai

Dalam hal ketersediaan SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, mengikuti Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, hal ini merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Skema pengukuran SDM yang kompeten dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural yang berdasarkan Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2017

Indikator dari Persentase SDM yang kompeten antara lain:

- a) Standar Kompetensi Manajerial:
 - 1) Integritas;
 - 2) Kerjasama;
 - 3) Komunikasi;
 - 4) Orientasi pada Hasil;
 - 5) Pelayanan Publik;
 - 6) Pengembangan diri dan Orang lain;
 - 7) Mengelola Perubahan; dan
 - 8) Pengambilan Keputusan;
- b) Standar Kompetensi Sosio Kultural yaitu : Perekat Bangsa

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil assessment, dari 38 (tiga puluh delapan) pegawai yang mengikuti assessment di Deputi 4, 2 (dua) pegawai mendapatkan mendapatkan hasil layak menduduki jabatan, 3 (tiga) pegawai mendapatkan mendapatkan hasil sangat siap ditugaskan, 3 (tiga) pegawai mendapatkan nilai siap ditugaskan, memenuhi syarat 19 (sembilan belas) orang, masih memenuhi syarat 5 (lima) pegawai, potensial 4 (empat) pegawai dan cukup potensial 3 (tiga) orang.

Tabel 3. 6 Hasil Assessment Deputi 4

No	Nilai Assessment	Jumlah
1	Layak Menduduki Jabatan	1
2	Sangat Siap ditugaskan	3
3	Siap ditugaskan	3
4	Memenuhi Syarat	19
5	Masih Memenuhi Syarat	5
6	Potensial	4
7	Cukup Potensial	3
Total		38

Untuk data keseluruhan pegawai pada Kedeputusan Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, dapat dilihat pada Matriks berikut :

Matriks Pegawai PNS pada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

DAFTAR PEGAWAI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TAHUN 2020												
NO	NAMA	NIP	LAMA MASA KERJA	JENIS KELAMIN	PANGKAT/GOL. RUANG	TMT	Pendidikan Terakhir	Jurusan	JABATAN	ASAL INSTANSI	STATUS PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7		8	9	10	11
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN												
1	Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc.	19671024 199312 2 001	27	Perempuan	Pembina Utama Madya, IV/d	01/04/2017	S3	Biologi Laut, University of Rostock	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	BPPT	Dipekerjakan	Eselon I
2	Dirhansayh Conbul, M.Sc	19701004 200212 1 001	18	Laki-laki	Pembina Tk. I, IV/b		S2	Christian albrechts University Of Kiel, Germany	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KKP		Eselon II.a
3	Sugeng Harmono, S.Hut., M.Si.	19730223 199903 1 001	21	Laki-laki	Pembina Tk. I, IV/b	01/10/2018	S2	Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia	Asisten Deputy Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK	Dipekerjakan	Eselon II.a
4	Dr.Farianna Prabandari, S.Hut., M.Si	19740221 199903 2 002	21	Perempuan	Pembina Tk. I, IV/b		S3	Kajian Lingkungan dan Pembangunan Univ. Brawijaya	Asisten Deputy Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK		Eselon II.a
5	Mochamad Saleh Nugrahadi, S.Si., M.Sc., Ph.D.	19710313 199701 1 001	23	Laki-laki	Pembina Tk. I, IV/b	01/04/2018	S3	Physical Oceanography, Kyushu University	Asisten Deputy Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	BPPT	Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon II.a
6	Rofi Alhanif, S.Pi, M.Sc	19720509 199703 1 002	23	Laki-laki	Pembina Tk. I, IV/b	01/10/2016	S2	Coastal Management Arhus University Denmark	Asisten Deputy Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KKP	Dipekerjakan	Eselon II.a
7	Kus Prisetiahadi S.Pi,M.Sc,Ph.D	19700925 199503 1 001	25	Laki-laki	Pembina Tk. I, IV/b	01/04/2015	S3	Engineering Science, Kyushu University	Asisten Deputy Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK	Dipekerjakan	Eselon III.a
8	Dr. Nurul Istiqomah, S.Pi., M.Si.	19730618 199803 2 001	22	Perempuan	Pembina Tk. I, IV/b	01/10/2017	S3	Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan, IPB	Kepala Bidang Optimalisasi Tata Lingkungan, Asisten Deputy Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KKP	Dipekerjakan	Eselon III.a
9	Ir. M. Rizal Panrelly, MTP	196911233 199403 1 010	26	Laki-laki	Pembina Tk. I, IV/b	01/10/2010	S2	Perencanaan Kota dan Daerah, UGM	Kepala Bidang Penanganan Limbah, Asisten Deputy Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pemda Kab. Banggai	Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon III.a
10	Zainuddin, S.Hut., M.Si	19721005 200212 1 008	18	Laki-laki	Pembina Tk. I, IV/b	01/04/2020	S2	S2 Manajemen, Universitas Khairun Ternate	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasaran Hutan Produksi, Asisten Deputy Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pemprov Maluku Utara	Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon III.a
11	Muhammad Suhendar, S.E., M.Si	19721027 200003 1 001	20	Laki-laki	Pembina, IV/a	01/10/2016	S2	Administrasi Publik, Universitas Terbuka	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Asisten Deputy Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KKP	Dipekerjakan	Eselon III.a
12	Yenung Secasari, MSc	19800203 200312 2 003	17	Perempuan	Pembina, IV/a	01/10/2019	S2	Ocean Engineering and Port Development, UNESCO-IHE Netherlands	Kepala Bidang Penataan Kawasan Daerah Aliran Sungai, Asisten Deputy Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	BRSDM-KKP	Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon III.a

13	Agustinah, S.H., MH	19730814 200112 2 004	19	Perempuan	Pembina/IV/a	01/04/2017	S2	Magister Ilmu Hukum	Kepala Bidang Penataan Kawasan Hutan, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Prov Banten	Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon III.a
14	Fatma Puspitasari, S.Sos, M.Si	19790504 200312 2 001	17	Perempuan	Pembina/IV/a		S2	Hukum, Universitas Indonesia	Kepala Bidang Pengendalian, Pemanfaatan dan Pelestarian Hutan, Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Ombudsman	Dipekerjakan	Eselon III.a
15	Agus Gunawan, ST, M.Eng.	19690812 199803 1 001	22	Laki-laki	Pembina/IV/a		S2	Material Science, Toyohashi University of Technology	Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK		Eselon III.a
16	Harimurti, S.P., MA	1973 1225 200003 1 001	17	Laki-laki	Pembina/IV/a		S2	School of Geography, University of Leeds, United Kingdom	Kepala Bidang Pengelolaan Lahan Gambut, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK		Eselon III.a
17	Rendra Kumia Hasan, S.H., M.Env	19820927 200901 1 006	11	Laki-laki	Penata Tk. I, III/d		S2	Perlindungan Lingkungan, Universitas Griffith, Australia	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK		Eselon III.a
18	Rita Octafiani, S.E., M.AB	1978.1025 200604 2 004	14	Perempuan	Penata Tk. I, III/d		S2	Kuangan Negara, STIA LAN	Kepala Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	KKP		Eselon III.a
19	La Ode Nurman Mbay, Msi	19750806 200801 1 016	12	Laki-laki	Penata Tk. I, III/d		S2	Sarjana Ilmu dan Teknologi Kelautan, IPB	Kepala Bagian Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan			Eselon III.a
20	Ike Rachmawati, S.Hut	19731007 199903 2 003	21	Perempuan	Penata Tk. I, III/d	01/04/2012	S1	Kehutanan IPB	Kepala Bidang Pengembangan Jasa Lingkungan, Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Kabupaten Bungo		Eselon III.a
21	Farida Ahmad, S.AP	19700108 198809 2 001	31	Perempuan	Penata Tk. I, III/d	01/10/2017	S1	Ilmu Administrasi Publik, STIA LAN	Kepala Bagian Administrasi Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pemda NTT	Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon III.a
22	Henry Antonius Manalu, S.H., M.H	19730603 199903 1 002	21	Laki-laki	Penata Tk. I, III/d	01/10/2017	S2	Hukum Pidana Ekonomi, UNS	Kepala Bidang Pengendalian Kebencanaan, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK	Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon III.a
23	Devita Safitri Nur Akbar, S.Kom, M. Env	19840705 200604 2 002	14	Perempuan	Penata Tk. I, III/d	01/04/2019	S2	Environmental Protection, Griffith University	Kepala Bidang Jasa Pemanfaatan Karbon, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	KLHK	Dipekerjakan	Eselon III.a
24	Titim Nursiah, S.P., M.Si	19741113 200701 2 017	16	Perempuan	Penata Tk. I, III/d	01/10/2019	S2	Ilmu Administrasi Negara, UNIDAYAN Baubau	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Administrasi Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pemkot Baubau	Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon IV.a
25	Diky Mahardika, S.Pi	19820817 201101 1 006	9	Laki-laki	Penata, III/c	01/04/2019	S1	Sosek Perikanan, IPB	Kepala Sub Bagian Pelaporan, Bagian Administrasi Umum, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pemprov Bali	Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon IV.a

26	Elfi Syafitri, SE	19860202 200501 2 002	15	Perempuan	Penata Muda Tk. I, II/b	01/10/2019	S1	Ekonomi, STIE Perdagangan	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Bagian Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pemkab. Solok	Kemenko Bidang Kemaritiman	Eselon IV/a
27	Achmad Kimsan, S.IP	19790409 200502 1 007	15	Laki-laki	Penata Muda, II/a	01/04/2017	S1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	Pemkot Baubau	Kemenko Bidang Kemaritiman	Pelaksana
28	Iswati Utamiputeri, S.Si., M.T	19900314 201801 2 001	2	Perempuan	Penata Muda Tk. I, II/b	01/01/2019	S2	Teknik Lingkungan, ITB	Analisis Kebijakan ANI Pertama pada Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Fungsional
29	Nur Fajriani Falah, S.I.Kom	19931230 201801 2 001	2	Perempuan	Penata Muda, II/a	01/01/2019	S1	Ilmu Komunikasi, Univ Diponegoro	Analisis Data dan Informasi pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
30	Lusy Pebrianti, S.Si	19940216 201801 2 002	2	Perempuan	Penata Muda, II/a	01/01/2019	S1	Statistika, Universitas Padjadjaran	Analisis Data dan Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
31	Sendy Pratiwi, S.I.Kom	19930903 201801 2 001	2	Perempuan	Penata Muda, II/a	01/01/2019	S1	Ilmu Komunikasi, London School of Public Relations Jakarta	Analisis Data dan Informasi pada Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
32	Makna Fathana Sabila, S.Si., M.Si	19920106 201901 2 001	1	Perempuan	Penata Muda Tk. I, II/b	01/01/2019	S2	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, IPB	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
33	Tri Wahyu Rahmanto, S.Kel	19890615 201901 1 001	1	Laki-laki	Penata Muda, II/a	01/01/2019	S1	Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
34	Yoco Priyanto, S.Farm., Apt.	19930408 201901 1 001	1	Laki-laki	Penata Muda, II/a	01/01/2019	S1	Farmasi Sains dan Teknologi, UGM	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
35	Indira Wido Primadipta, S.T	19950604 201901 2 001	1	Perempuan	Penata Muda, II/a	01/01/2019	S1	Teknik Lingkungan, ITS	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
36	Ardha Yosef Retmana, S.Kel	19910421 201901 1 001	1	Laki-laki	Penata Muda, II/a	01/01/2019	S1	Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
37	Easter Debora, S.T	19920406 201902 2 004	1	Perempuan	Penata Muda, II/a	01/01/2019	S1	Teknik Lingkungan, ITS	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana
38	Greisella Meiranda, S.Tr	19970511 201901 2 001	1	Perempuan	Penata Muda, II/a	01/01/2019	S1	Manajemen Transportasi, Sekolah Tinggi Maritim dan Transportasi "AMNI" Semarang	Penyusun Bahan Kebijakan pada Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		PNS	Pelaksana

DATA TKK DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

NO	NAMA	TUGAS JABATAN	PENEMPATAN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	NO ID	PENDIDIKAN	TANGGAL LAHIR	UMUR
1	Akrom	Pendukung Administrasi	Sekretariat Deputi	Pati, 3 Juni 1986	120000319	S1	1986-03-06	35
2	Nurmita Wasanda	Pendukung Administrasi	Sekretariat Deputi	Jakarta, 23 November 1996	120000325	S1	1996-11-23	24
3	Debby Yolanda	Pendukung Administrasi	Asdep Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	Jakarta, 11 April 2019	120000324	SMA	1992-01-31	29
4	Abunaim Arifin	Pendukung Administrasi	Sekretariat Deputi	Pinrang, 17 September 1992	120000580	S1	1994-04-11	27
5	Risdho A. Hutapea	Pendukung Administrasi	Asdep Jejaring Inovasi Maritim, Deputi IV	Sidamanik, 19 Maret 1982	120000596	D-III	1992-09-17	28
6	Hilal Maulana Firdaus	Pendukung Administrasi	Asdep Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Bogor, 03 Oktober 1990		S1	1980-02-18	41
7	Mukhlisa Arif Hanubun	Pendukung Administrasi	Asdep Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi SDA	Tual, 28 Agustus 1992		S1	1990-10-03	30

3.1.10 Sasaran Strategis 10

Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Untuk capaian Sasaran Strategis 10 ini mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama, seperti Tabel Berikut :

Tabel 3. 7 Sasaran Strategis 10

SS.10	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	11	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	75	125%
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	>65	94%

1. Capaian Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam program reformasi birokrasi Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan terdapat 8 (delapan) area perubahan yaitu:

1. Manajemen Perubahan

Melaksanakan perubahan tata kelola organisasi dengan menganut nilai-nilai PATEN untuk peningkatan kinerja organisasi

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan dan menurunkannya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang ada di lingkup kementerian yang berada dibawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Meningkatkan efektivitas organisasi instansi pemerintah yang proposional, tepat fungsi, tepat ukuran, serta tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi internal instansi.
4. Penataan Tata Laksana
Meningkatkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Menciptakan SDM aparatur berintegrasi, netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
6. Penguatan Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN.
7. Penguatan Pengawasan
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.
8. Penguatan Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Berdasarkan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020 serta menindaklanjuti capaian hasil pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Menuju 80%, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan telah menetapkan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2020 meliputi 8 (delapan) Area Perubahan yang ditargetkan untuk dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2020 sebagaimana Nota Dinas Nomor : ND. 087/DIV.0/Marves/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Rencana Kerja	Output	Pelaksanaan											
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt	Nov	Des
1	Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020												
2	Menyusun Rencana Kerja Agen Perubahan Tahun 2020												

Rencana Kerja	Output	Pelaksanaan												
		TW I			TW II			TW III			TW IV			
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	
3	Internalisasi Renja RB dan Renja Agen Perubahan di Lingkup Deputi PLK	Sosialisasi Renja RB dan Renja Agen Perubahan di Lingkup Deputi PLK												
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan quick win Deputi PLK	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan quick win Deputi PLK												
5	Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Agen Perubahan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Agen Perubahan												
6	Fasilitasi pelaksanaan Rencana Kerja Agen Perubahan	Melaksanakan rencana kerja yang sudah disusun oleh agen perubahan, membuat laporan dan hasil kegiatan												
7	Mengoordinir dan melaksanakan PMPRB	Menyiapkan jadwal, melakukan pengisian LKE RB sesuai dengan kemampuan dan kapasitas Deputi PLK, dan menyusun RATL yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Deputi PLK												
8	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan RB Deputi PLK	Dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB Deputi PLK Tahun 2020. (triwulan)												
		Laporan Pelaksanaan RB												

Rencana Kerja	Output	Pelaksanaan											
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agu	Sept	Okt	Nov	Des
	Tahun 2020.												
9	Asesor mencapai konsensus atas pencapaian pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB.	Berita Acara Konsensus											

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Rencana Kerja	Output	Pelaksanaan											
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Melakukan identifikasi, pemetaan, dan analisis terhadap peraturan Perundang- Undangan yang tumpang tindih/tidak harmonis/tidak sinkron di bidang Kemaritiman dan Investasi	Laporan hasil pemantauan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih/tidak harmonis/tidak sinkron di bidang Kemaritiman dan investasi.											

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Rencana Kerja	Output	Pelaksanaan											
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Melaksanakan Penataan Organisasi dalam rangka memperjelas wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja di lingkungan Deputi PLK	Permenko Nomor 2 Tahun 2020, Peta Proses Bisnis (Evidence bersama), Struktur D4											

4. Penataan Tatalasana

	Rencana Kerja	Output	Pelaksanaan													
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Lingkup Deputi PLK	Peta Proses Deputi PLK														
2	Penyusunan SOP Deputi PLK	SOP Lingkup Deputi PLK														
3	Sosialisasi SOP	Dokumen Sosialisasi SOP														
4	Evaluasi SOP	Dokumen Evaluasi SOP														
5	Mengembangkan sistem penataan arsip	Terbangun Sistem Penataan Arsip														
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Arsip dengan Sistem Aplikasi Arsip yang telah terbangun	Dokumen Monev dan laporan														

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

	Rencana Kerja	Output	Pelaksanaan													
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Deputi PLK	Dokumen ANJAB dan ABK														
2	Penyusunan PK Pejabat Eselon I sampai dengan PK Staf Deputi PLK	Dokumen PK seluruh Pejabat dan Staf Deputi PLK														
3	Pelaksanaan pengukuran kinerja individu secara periodik	Laporan pengukuran kinerja individu														
4	Pelaksanaan monev atas capaian kinerja individu	Dokumen SKP Individu														

Rencana Kerja	Output	Pelaksanaan											
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
5	Pelaksanaan Evaluasi	Dokumen pembinaan pegawai berupa piagam sebagai reward atau surat teguran sebagai punishment											
6	Sosialisasi Peraturan Disiplin PNS/Kode Etik	Laporan pelaksanaan Sosialisasi dan SE Deputi PLK tentang Tata Tertib											
7	Monev terhadap pelaksanaan peraturan disiplin pegawai/kode etik	Laporan hasil Monev											
8	Pelaksanaan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ Lingkup Deputi PLK	Laporan Kesesuaian Syarat Jabatan dengan Pemangku Jabatan											
9	Penetapan Kamus Kompetensi Teknis Deputi PLK	Kepmenko tentang Standar Kompetensi Jabatan											
10	Menginformasikan akun sistem informasi kepegawaian kepada seluruh pegawai Lingkup Deputi PLK	Nota Dinas Informasi Akun Sistem Informasi Kepegawaian dan Screenshot Aplikasi SIKAP											

6. Penguatan Akuntabilitas

Rencana Kerja	Output	Pelaksanaan											
		TW I			TW II			TW III			TW IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan Rancangan Renstra Deputi PLK tahun 2020-2024	Dokumen Renstra Deputi PLK											
2	Laporan pemantauan kinerja setiap triwulan yang disampaikan kepada Menteri	Laporan hasil Pemantauan (LAKIP)											

Rencana Kerja	Output	Pelaksanaan																				
		TW I			TW II			TW III			TW IV											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des									
3	Melakukan penilaian kinerja Unit dan Individu																					
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Aksi lingkup Deputi																					

7. Penguatan Pengawasan

Rencana Kerja	Output	Pelaksanaan																				
		TW I			TW II			TW III			TW IV											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des									
1	Membuat public campaign terkait gratifikasi																					
2	Mendorong keaktifan pegawai dalam mengisi LHKPN/LHKASN																					

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Rencana Kerja	Output	Pelaksanaan																				
		TW I			TW II			TW III			TW IV											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des									
1	Membuat Maklumat Standar Pelayanan																					
2	Pelaksanaan peningkatan kapasitas pegawai pemberi pelayanan Deputi PLK																					
3	Melaksanakan survei pemberian pelayanan Publik Deputi PLK																					
4	Melakukan evaluasi pemberian pelayanan publik Deputi PLK																					

Dalam rangka mempercepat tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya birokrasi pemerintahan yang professional dan berintegritas tinggi, reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan berfokus pada 8 (delapan) area perubahan dan 8 (delapan) kegiatan Agen Of Change.

Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi telah dibentuk Tim Pokja Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor : 71/DIV Tahun Tanggal 16 Juni 2020 tentang Kelompok Kerja Penguatan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sebagai berikut :

- Pokja Manajemen Perubahan
- Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi
- Pokja Penataan Tatalaksana
- Pokja Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
- Pokja penguatan Akuntabilitas
- Pokja Penguatan Pengawasan
- Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melanjutkan kegiatan berdasarkan rekomendasi pada evaluasi dan verifikasi lapangan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaeritiman dan Investasi oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan ukuran dan target yang relevan, spesifik, dan terukur untuk setiap area perubahan yang akan dicapai;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas ukuran dan target masing- masing area perubahan, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunan reformasi birokrasi di setiap area perubahan;
- c. Menginternalisasikan secara terus menerus budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi agar benar-benar menjadi budaya yang melekat dalam setiap individu pegawai;
- d. Menyusun dan menyempurnakan peta bisnis proses yang sesuai dengan kinerja utama Kemnko Marves dan secara berkala melakukan reviu atas SOP yang telah ditetapkan;
- e. Menyusun dan melakukan evaluasi atas kebijakan informasi terbuka sebagai upaya melakukan transparansi dalam manajemen kinerja;

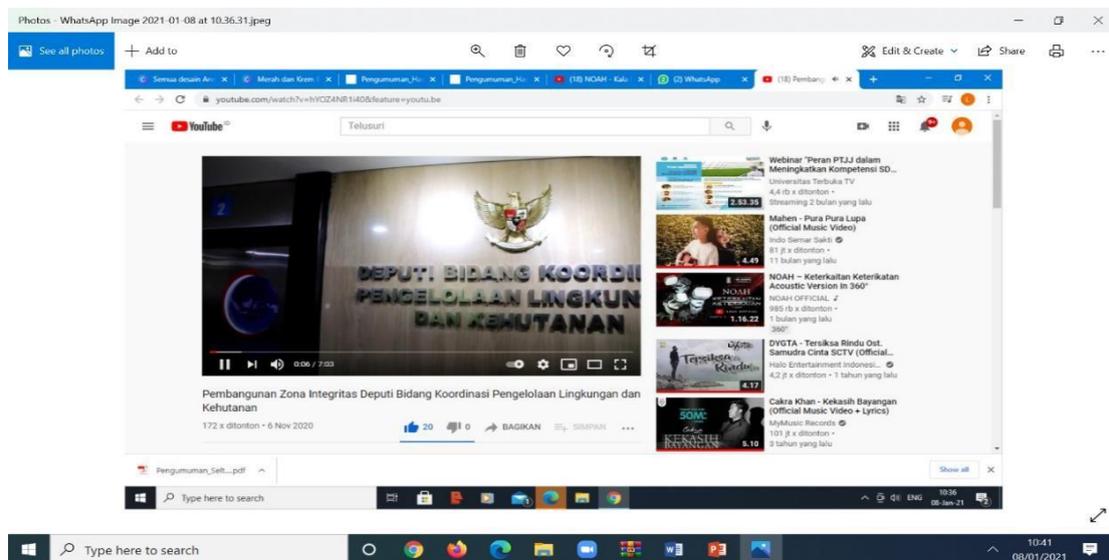
- f. Menyempurnakan ukuran kinerja setiap pegawai agar lebih menggambarkan hasil kerja yang spesifik dan unik;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengukuran secara berkala kinerja pegawai;
- h. Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan gratifikasi, WBS, penanganan pengaduan masyarakat, serta benturan kepentingan serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi tersebut;
- i. Mendorong penerapan zona integritas Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
- j. Menyusun suatu pedoman penerapan sistem akuntabilitas kinerja internal untuk mendorong penguatan akuntabilitas serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara;
- k. Reviu atas SOP pelayanan dalam rangka mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan telah melaksanakan program reformasi birokrasi terkait 8 (delapan) area perubahan sejak awal bulan Maret 2020, sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melakukan perbaikan yang berkelanjutan guna dapat meningkatkan manfaat pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala (per triwulan) melalui evaluasi atas pengumpulan data/dokumen (*evidence*) dan pembahasan bersama pejabat/pegawai terkait. Capaian pelaksanaan pada Triwulan IV merupakan lanjutan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan sejak awal bulan Maret s.d. September 2020 (Triwulan III). Adapun Hasil pelaksanaan reformasi birokrasi pada Triwulan IV per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

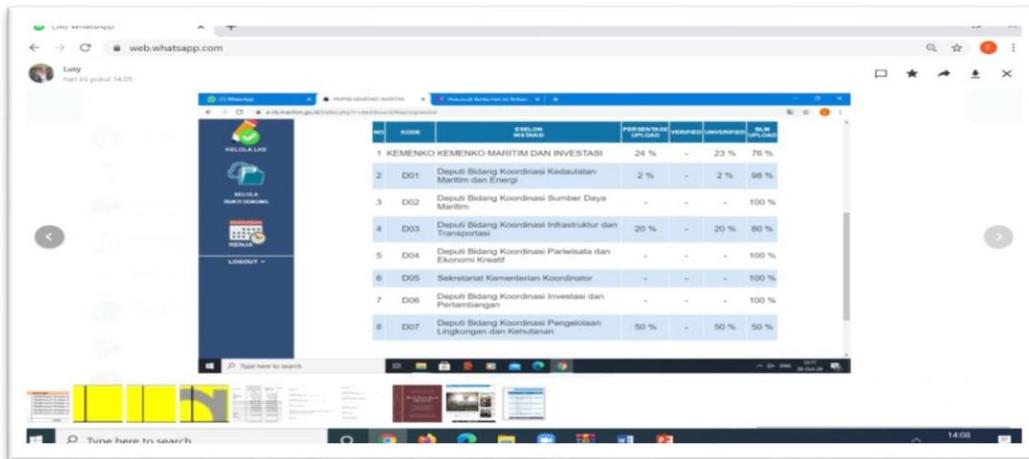
1. Hasil pelaksanaan/capaian kegiatan **pokja manajemen perubahan**
 - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas dan Quick Wins Tahun 2020, 22-24 Oktober 2020 di Hotel Royal Bandung.
 - Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi Program Prioritas dan Quickwin di Aston Lake Sentuk tanggal 17-19 Desember 2020.
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas pada tanggal 9-10 Oktober 2020 di Hotel Alana Sentul.

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja Agen Perubahan Triwulan IV.
- Penginputan data dukung Pelaksanaan RB Deputy PLK pada Aplikasi E- RB Kemenko Marves pada bulan Oktober 2020 dan pada tanggal 13 Nopember 2020 dengan persentase 100% data telah terinput.
- Terlaksananya rapat koordinasi validasi data dukung pada aplikasi e- RB dan persiapan penilaian agen perubahan tanggal 30 Nopember 2020.
- Telaksananya rapat persiapan pelaksanaan evaluasi Zona Integritas menuju WBK di Hotel Darmawan Park tanggal 2-4 November 2020.
- Keikutsertaan dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK 26 Oktober 2020 dari Biro Hukum.
- terselesaikannya Pembuatan Video ZI Lingkup Deputy PLK dan telah di upload di media Youtube pada tanggal 6 November 2020.
- Mengikuti Pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) Tahun 2020 oleh Kemenpan RB pada tanggal 9 November 2020.
- Keikutsertaan dalam pengisian survey monitoring dan evaluasi Agen Perubahan Lingkup Kemenko Marves tanggal 26 November 2020 pada link survei : <https://bit.ly/SurveiA OCD4>.



Gambar 3. 14 Upload Video Zi Di Media Youtube

Evaluasi Pelaksanaan ZI Menuju WBK oleh Menpan RB tanggal 9 November 2020



Gambar 3. 15 Penginputan Evidence Pelaksanaan RB Pada Aplikasi E-RB Kemenkomarves

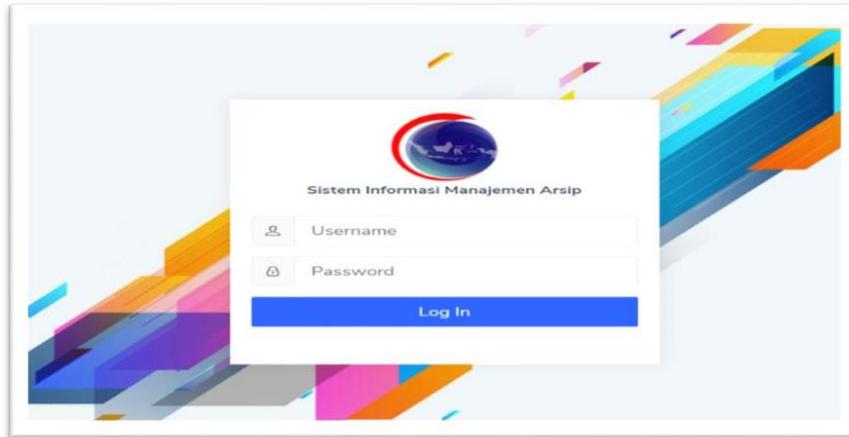
1. Hasil pelaksanaan/capaian kegiatan **pokja penataan peraturan perundang-undangan**:
 - Terselesaikannya Draft Dokumen Laporan Capaian Program Prioritas dan Quickwin Deputi PLK Semeseter II TA.2020.
 - Mengikuti Rapat Koordinasi Penyelesaian Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan tanggal 21-24 Oktober 2020 yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Setmenko Marves.

2. Mengikuti Kegiatan Workshop Penataan Pola Hubungan Kerja JPT dan JF Hasil pelaksanaan/capaian kegiatan **pokja penataan dan penguatan organisasi**
 - Paska Penyederhanaan Birokrasi di Hotel Trans Bali Tanggal 12-14 Oktober 2020 yang diselenggarakan oleh Setmenko Marves.
 - Mengikuti Kegiatan Rapat Teknis Review Formasi Kebutuhan Pegawai Pasca Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan Penyusunan Anjab dan ABK Pasca Penyederhanaan Birokrasi, tanggal 18-19 November 2020.

3. Hasil pelaksanaan/capaian kegiatan **pokja penataan ketatalaksanaan**
 - Telaksananya rapat koordinasi penyusunan draft SOP pasca penyederhanaan birokrasi di Hotel Darmawan Park tanggal 2-4 November 2020.
 - Terlaksananya rapat koordinasi update aplikasi SIMAS tanggal 5 Desember 2020.
 - Terselesaikannya update Finalisasi Aplikasi SIMAS dan Aplikasi PCM tanggal 7 Desember 2020;
 - Tersedianya Draft SOP Pasca Penyederhanaan Birokrasi Lingkup Deputi

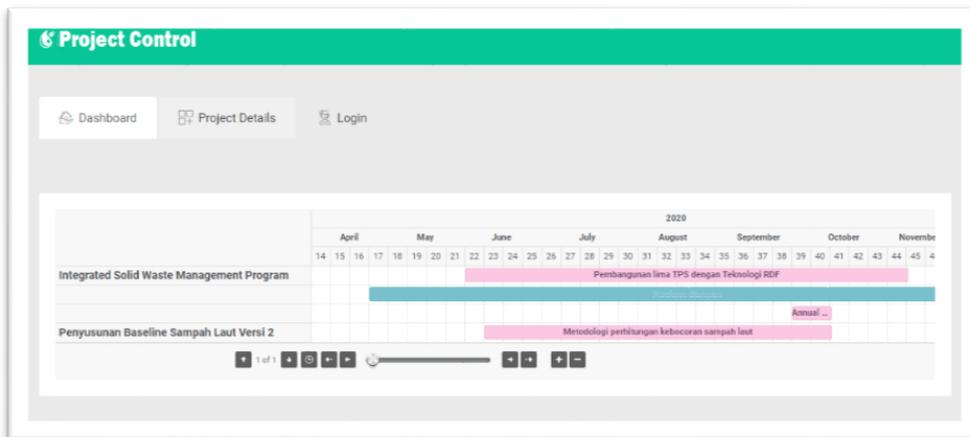
PLK.

- Terlaksananya Update Pengembangan Aplikasi SATUGARPU Lingkup Deputy PLK.



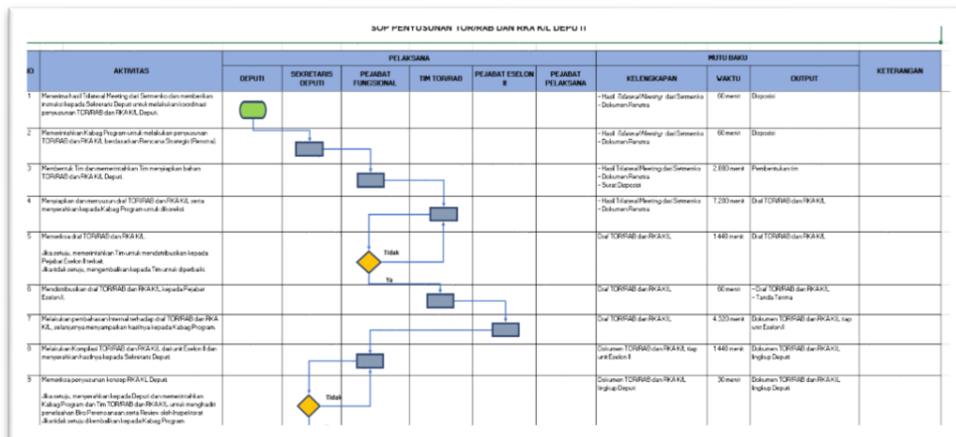
Gambar 3. 16 SIMAS

Sumber: <https://marves.id/simas>



Gambar 3. 17 PCM

Sumber: <https://marves.id/projectcontrol>



Gambar 3. 18 Draft SOP Pasca Penyerderhanaan Birokrasi Deputy PLK

Draft SOP Pasca Penyederhanaan Birokrasi Deputi PLK.

4. Hasil pelaksanaan/capaian kegiatan **pokja sistem sumber daya Aparatur:**
- Tersusunnya Draft Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Pasca Penyederhanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.
 - Tersedianya Draft Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kinerja PNS Semester II Tahun 2020 sampai dengan level Staf.
 - Keikutsertaan Deputi PLK dalam Rapat Evaluasi Pembangunan aplikasi Pengelolaan Data Kepegawaian dan Penginputan Data Kepegawaian pada Aplikasi Marves HR pada 1-3 Oktober 2020 di The Green Forest Resort Bandung.
 - Mengirimkan peserta Bimtek Penyusunan SOP Pasca Penyederhanaan Birokrasi pada tanggal 12 November 2020 yang diselenggarakan oleh Biro Hukum.
 - Mengirimkan peserta workshop Peningkatan Kapasitas MC Tingkat Lanjut di Lingkup Kemenko Marves di Hotel Intercontinental Bandung 11-13 November 2020.
 - Mengirimkan peserta Bimtek aplikasi SIK-M & Pengisian data kinerja TA 2020 pada aplikasi SIK-M di Aston Sentul Lake Resort & Conference Center 15 s.d 17 Oktober 2020.
 - Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Diklat Deputi PLK TA. 2020 dan telah disampaikan kepada Kepala Biro Umum, Setmenko Marves sesuai Nota Dinas Nomor : 092.1/D.IV/Marves/X/2020 Tanggal 19 Oktober 2020.

NO	KELOMPOK & JABATAN	Jumlah Pegawai	Salinan	Salinan	Salinan	Salinan
1	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
2	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
3	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
4	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
5	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
6	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
7	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
8	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
9	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
10	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
11	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
12	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
13	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
14	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
15	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
16	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
17	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
18	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
19	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
20	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
21	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
22	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
23	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
24	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
25	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
26	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
27	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
28	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
29	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
30	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
31	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
32	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
33	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
34	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
35	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
36	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
37	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
38	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
39	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
40	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
41	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
42	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
43	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
44	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
45	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
46	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
47	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
48	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
49	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
50	Deputi Bidang	1	1	1	1	1

Gambar 3. 19 Rekapitulasi Kebutuhan JF & Pelaksana

NO	KELOMPOK & JABATAN	Jumlah Pegawai	Salinan	Salinan	Salinan	Salinan
1	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
2	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
3	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
4	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
5	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
6	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
7	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
8	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
9	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
10	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
11	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
12	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
13	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
14	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
15	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
16	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
17	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
18	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
19	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
20	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
21	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
22	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
23	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
24	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
25	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
26	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
27	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
28	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
29	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
30	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
31	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
32	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
33	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
34	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
35	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
36	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
37	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
38	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
39	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
40	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
41	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
42	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
43	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
44	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
45	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
46	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
47	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
48	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
49	Deputi Bidang	1	1	1	1	1
50	Deputi Bidang	1	1	1	1	1

Gambar 3. 20 Draft Anjab dan ABK Pasca penyederhanaan Birokrasi

1	nama	Faria Ahmad, S.AP	1	nama	Lily Maharhika, S.P			
2	NIP	1970109 199903 2 001	2	NIP	19820817 201811 1 006			
3	Pangkat/Gol Ruang	Penasia Tk. I (III/d)	3	Pangkat/Gol Ruang	Penasia (III/c)			
4	Jabatan	Kepala Bagian Administrasi Umum	4	Jabatan	Kepala Sub Bagian Pelaporan			
5	Unit Kerja	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	5	Unit Kerja	Bagian Administrasi Umum			
NO III. KEGIATAN TUGAS JABATAN			AK TARGET					
				KUANTITAS	KUALITAS	WAKTU	BIAYA	
1	Menyusun rencana kerja dan kegiatan penyusunan pelaporan kegiatan, pelaporan keuangan dan verifikasi keuangan Semester II	0	1	Dokumen	100	1	Bulan	-
2	Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bulanan lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan periode Juli - Desember 2020	0	6	Laporan	100	6	Bulan	-
3	Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan lingkup Deputi	0	150	Berbas SPJ Keuangan	100	6	Bulan	-
4	Menyusun laporan penguasaan pelaksanaan kegiatan Lingkup Sekretariat Deputi	0	24	Laporan	100	6	Bulan	-
5	Monitoring dan evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Arsip dan Surat (SIMAS) dan Sistem Informasi PCM Lingkup Deputi	0	1	Dokumen	100	6	Bulan	-
6	Menyusun Laporan Pengelolaan Keuangan Lingkup Deputi	0	2	Laporan	100	6	Bulan	-
7	Menyusun Laporan Pengembangan Sistem Laporan dan Database (Sistem Informasi Manajemen Arsip dan Surat)	0	2	Laporan	100	6	Bulan	-
Pejabat Penilai,			Jakarta, 1 Juli 2020 Pegawai Negeri Sipil Yang Ditilai					
Faria Ahmad, S.AP NIP. 1970109 199903 2 001			Lily Maharhika, S.P NIP. 19820817 201811 1 006					

Gambar 3. 21 Draft SKP Semester II Tanggal 31 Desember Tahun 2020



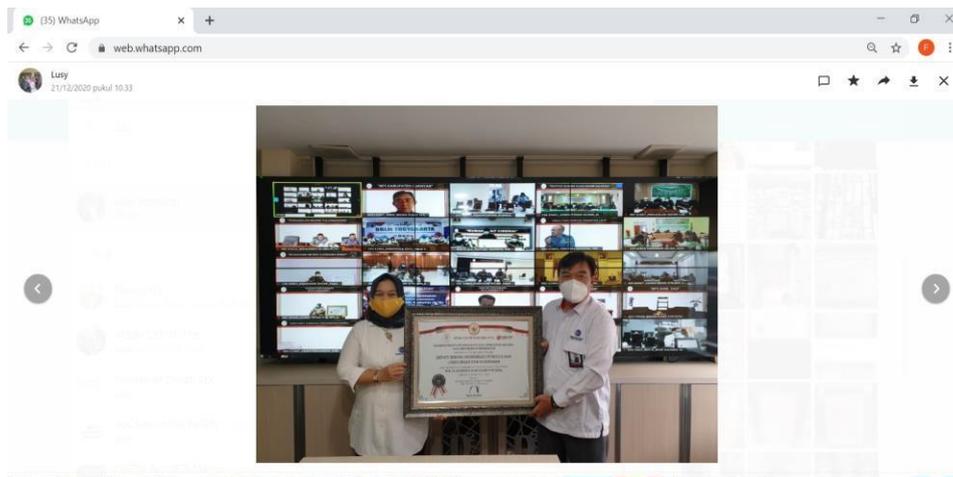
Gambar 3. 22 Penginputan Data Pegawai PLK dalam Aplikasi Marves HR Kemenko Marves

5. Hasil pelaksanaan/capaian kegiatan **pokja penguatan akuntabilitas**

- Tersusunnya Draft Dokumen Rencana Strategis Unit Eselon II Lingkup Deputi PLK Tahun 2020-2024.
- Tersusunnya Dokumen LAKIP Deputi PLK Triwulan IV Tahun 2020
- terselesaikannya seluruh evidence indikator kinerja utama lingkup Eselon I dan II Deputi PLK
- Keikutsertaan Deputi PLK pada kegiatan finalisasi Pedoman Umum SAKIP dan Monitoring Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba tanggal 1-2 Oktober 2020
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Major Project Deputi PLK 13 Oktober 2020
- Terlaksananya Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Proyek Prioritas Strategis (Major Projects) Tahun 2020 tanggal 20-21 Oktober 2020 di Hotel Aston Bogor BNR.
- Keikutsertaan Deputi PLK dalam kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I di Hotel Royal Tulip Bogor tanggal 15-16 Oktober 2020 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kemenko Marves.

6. Hasil pelaksanaan/capaian kegiatan **pokja penguatan pengawasan**

- Mengikuti kegiatan Sosialisasi Risk Assessment di Hotel Pullman Hotel Jakarta Indonesia 3 November 2020 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kemenko Marves.
- Penerimaan Piagam Penghargaan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas dari Kemenpan RB kepada Deputy Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, sebagai salah satu Unit Eselon I Lingkup Kemenko Marves sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 21 Desember 2020.
- Rapat penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) dari Biro Umum di Hotel Ibis Style 20-22 November 2020.



Gambar 3. 23 Penerimaan Apresiasi dan Penganugerahan Piagam Penghargaan sebagai Unit Kerja ZI berpredikat WBK dari Kemenpan RB tanggal 21 Desember 2020

7. Hasil pelaksanaan/capaian kegiatan **pokja peningkatan kualitas pelayanan publik**

- Update Sistem Kepuasan Layanan Lingkup Deputy PLK
- Pengisian Survei Internal Kapasitas Organisasi Lingkup Kemenko Marves tanggal 16 Oktober 2020

Untuk Capaian Nilai PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, dari hasil peniliasn Assesor Unit Eselon I, Tim Penilai Internal (Inspektorat) bersama Tim RB Biro Hukum telah melakukan Validasi secara objektif terhadap data dukung yang disampaikan yaitu sebesar **34,13 (Nilai Capaian Maksimal 36)**, atau sebesar 93%.

Capaian Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Kedeputian baru sesuai dengan Permenko no. 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada Tahun 2020, indikator kinerja kedeputian untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik menargetkan nilai Evaluasi AKIP 2020 sebesar 65. Realisasi yang didapatkan dari penilaian inspektorat dengan nilai angka sebesar 65.37 atau kategori B atau tercapai sebesar 100 persen. Interpretasi dari nilai AKIP B artinya akuntabilitas kerjanya sudah baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, hanya perlu sedikit perbaikan.

3.1.11 Sasaran Strategis 11 Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan

Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan terdiri dari 6 unit kerja Eselon II (1 Sekretariat Deputy dan 5 Asisten Deputy) telah menetapkan target kinerja sebanyak 15 Sub Output kegiatan yang ditetapkan penganggarannya di dalam dokumen RKA-KL TA. 2020.

Pengelolaan Keuangan di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Deputy dalam rangka mewujudkan layanan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan Keuangan Triwulan III ini disusun berdasarkan sumber data yang sebenarnya agar bisa dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Dari data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Revisi Anggaran pada Satker Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sampai dengan Triwulan IV T.A 2020 telah dilakukan sebanyak 9 kali revisi DIPA. Dimana pengelolaan anggaran berdasarkan output Keduputian SOTK baru sejak Revisi DIPA ke-5 tanggal 14 Agustus 2020.
- b. Realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Data SAS adalah sebesar Rp. 8.349.235.468.- (96.94%) dari total pagu anggaran Rp. 8.613.012.000,- yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran UP/TUP dan LS (terdiri dari LS Bendahara, LS, Kontraktual dan LS Pihak Ketiga) dengan rincian sebagai berikut :
 - Mekanisme UP/TUP : Rp. 3.521.237.894,-
 - Mekanisme LS : Rp. 4.827.997.574,-
- c. Jumlah kegiatan yang dilakukan dengan mekanisme kontraktual sampai dengan Triwulan III sebanyak 8 (delapan) kegiatan (dokumen kontrak) dengan total nilai kontrak sebesar Rp.615.474.700,-.
- d. Jumlah SP2D LS dan TUP yang terbit sampai dengan Triwulan IV T.A 2020 sebanyak 306 SP2D. Dari jumlah tersebut dokumen SPJ Keuangan yang telah dirampungkan seluruhnya sebanyak 306 berkas
- e. Berdasarkan konfirmasi Bagian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sampai dengan Triwulan IV T.A 2020 pada pengelolaan SPJ unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tidak terdapat Penolakan SPM.

Untuk Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada tahun 2020 yaitu sebesar 95, dan per Desember 2020 Tercapai Nilai 8 atau sebesar 93% dari target yang di Perjanjikan.

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, maka hal-hal yang harus dilakukan diantaranya:

- a. Harus adanya sistem monitoring dan evaluasi yang jelas agar

memudahkan dalam mengontrol pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, sehingga dapat meminimalisir masalah-masalah yang akan timbul terkait pengelolaan keuangan.

- b. Untuk membuat laporan keuangan triwulan selanjutnya sebaiknya mengacu pada laporan keuangan sebelumnya sehingga datanya akan sesuai dan relevan.

3.2 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Alokasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan pada awal Triwulan III TA. 2020 masih menggunakan sebagian anggaran SOTK yang lama Pagu Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim yang berdasarkan DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman No. SP.DIPA- 120.01.1.350949/2020 tanggal pengesahan 5 Desember 2019. Alokasi anggaran yang digunakan adalah MAK 5761 Koordinasi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim sebesar Rp. 4.278.588.000,- dan sebagian anggaran MAK 5764 Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi SDM Iptek dan Budaya Maritim sebesar Rp.

3.985.483.000,- dari total anggaran Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebesar Rp.21.461.961.000,-.

Alokasi anggaran yang mengakomodir output kegiatan Unit kerja SOTK baru terjadi pada bulan Agustus 2020. Pada Triwulan III 2020 terjadi 2 kali Revisi DIPA yang menyebabkan Pagu Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan berubah menjadi Rp. 8.613.012.000,- detail anggaran sebagai berikut dilihat pada Tabel

Tabel 3. 8 Pagu Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang masih menempel pada output 5761 anggaran Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim (SOTK Lama) pada DIPA Awal Satker Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi TA 2020

Kode	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)
5608	Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim	5.500.460.000
5761	Koordinasi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim	4.278.588.000
5762	Koordinasi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari	3.986.314.000
5763	Koordinasi Jejaring Inovasi Maritim	3.711.116.000
5764	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim	3.985.483.000
Total		21.461.961.000

Setelah pengesahan SOTK baru sesuai dengan Permenko no. 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada Tahun 2020, Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan memiliki DIPA Sendiri dengan struktur anggaran :

Tabel 3. 9 Struktur Anggaran Kode

KODE	URAIAN	JUMLAH
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan		8,613,012,000
5996	Koordinasi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	960,000,000
5996.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Penataan Kawasan	272,000,000
5996.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengelolaan	290,000,000
5996.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Optimalisasi Tata	398,000,000
5997	Koordinasi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	760,000,000
5997.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengembangan dan Pemasaran Produk Hutan	279,117,000

5997.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengembangan Jasa	238,065,000
5997.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengendalian	242,818,000
5998	Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam	1,210,000,000
5998.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Penataan Kawasan	273,192,000
5998.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Restorasi Kualitas	457,636,000
5998.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Konservasi Sumber	479,172,000
5999	Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	960,000,000
5999.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengelolaan Sampah	300,382,000
5999.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Penanganan Limbah	302,028,000
5999.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengendalian	357,590,000
6000	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	3,663,012,000
6000.001.001	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	1,996,484,300
6000.001.002	Ketatausahaan dan Pelaporan Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	1,666,527,700
6001	Koordinasi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	1,060,000,000
6001.001.001	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengelolaan	364,402,000
6001.001.002	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pemanfaatan Karbon	323,342,000

6001.001.003	Penyiapan Bahan Kebijakan Bidang Pengendalian	372,256,000
--------------	---	-------------

Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Data SAS adalah sebesar Rp. 8.349.235.468,- (96.94%) dari total pagu anggaran Rp. 8.613.012.000,- yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran UP/TUP dan LS (terdiri dari LS Bendahara, LS, Kontraktual dan LS Pihak Ketiga) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Mekanisme UP/TUP : Rp. 3.521.237.894,-
- 2) Mekanisme LS : Rp. 4.827.997.574,-

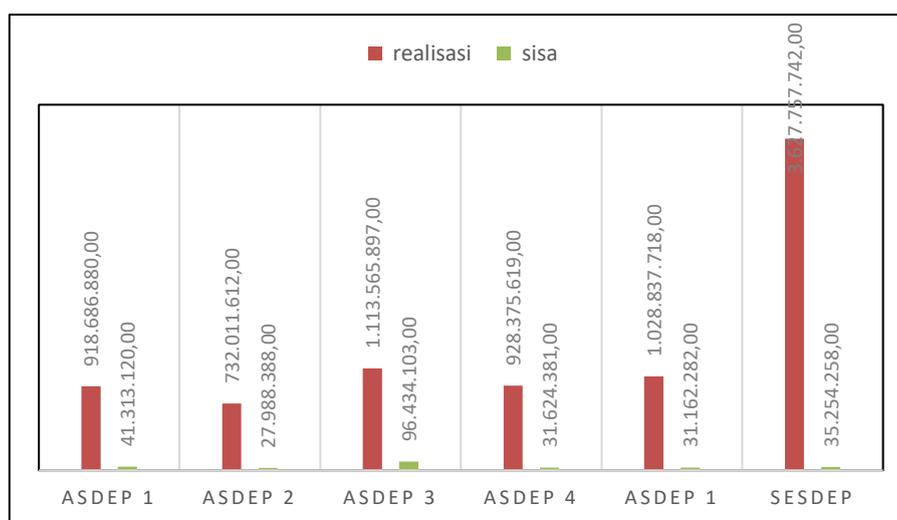
Sesuai Data SAS pada tabel 7 terlihat bahwa persentase penyerapan anggaran tertinggi dicapai oleh Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yakni sebesar sebesar Rp. 3.627.757.742,- (99,04%) dari total pagu anggaran Rp. 3.663.012.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 35.254.258,- (0,96%).

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran s.d Triwulan IV TA. 2020 Per Unit Kerja II Lingkup Deputi

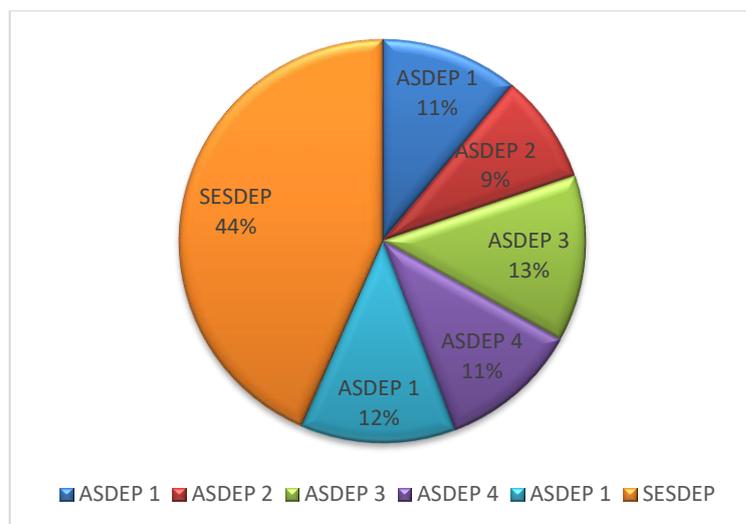
NO	KODE	URAIAN	PAGU	RELISASI SEPTEMBER S.D. DESEMBER TA. 2020							
				REALISASI		REALISASI		REALISASI		REALISASI	
				SEPTEMBER	%	OKTOBER	%	NOVEMBER	%	DESEMBER	%
1		D4	13,627,286,000	6,487,641,781	47.61%	6,986,610,211	51.27%	10,079,376,836	73.96%	13,345,283,961	97.93%
2		Deputi Bidang Koordinasi SDM IPTEK dan Budaya Maritim	5,014,274,000	4,996,048,493	99.64%	4,996,048,493	99.64%	4,996,048,493	99.64%	4,996,048,493	99.64%
3		Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	8,613,012,000	1,491,593,288	17.32%	1,990,561,718	23.11%	5,083,328,343	59.02%	8,349,235,468	96.94%
4	5996	Koordinasi Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan	960,000,000	87,990,700	9.17%	123,203,100	12.83%	395,980,900	41.25%	918,686,880	95.70%
5	5997	Koordinasi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	760,000,000	78,478,780	10.33%	156,112,780	20.54%	563,208,969	74.11%	732,011,612	96.32%
6	5998	Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam	1,210,000,000	419,880,551	34.70%	546,514,751	45.17%	695,752,457	57.50%	1,113,565,897	92.03%
7	5999	Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	960,000,000	188,787,735	19.67%	235,032,135	24.48%	536,091,795	55.84%	928,375,619	96.71%
8	6000	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	3,663,012,000	399,554,262	10.91%	594,717,992	16.24%	2,363,538,636	64.52%	3,627,757,742	99.04%
9	6001	Koordinasi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	1,060,000,000	316,901,260	29.90%	334,980,960	31.60%	528,755,586	49.88%	1,028,837,718	97.06%

Tabel 3. 11 *Realisasi Anggaran Triwulan IV TA. 2020 berdasarkan Mekanisme Pembayaran*

Kode	ket	pagu	realisasi	Pembayaran UP/TUP	Pembayaran LS	sis
06	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman					
5996	Koordinasi Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan	960,000,000.00	918,686,880.00	218,756,500.00	699,930,380.00	41,313,120.00
5997	Koordinasi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan	760,000,000.00	732,011,612.00	139,607,299.00	592,404,313.00	27,988,388.00
5998	Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam	1,210,000,000.00	1,113,565,897.00	531,117,586.00	582,448,311.00	96,434,103.00
5999	Koordinasi Pengelolaan Sampah dan Limbah	960,000,000.00	928,375,619.00	448,866,864.00	479,508,755.00	31,624,381.00
6000	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	3,663,012,000.00	3,627,757,742.00	1,512,212,013.00	2,115,545,729.00	35,254,258.00
6001	Koordinasi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan	1,060,000,000.00	1,028,837,718.00	670,677,632.00	358,160,086.00	31,162,282.00
	TOTAL	8,613,012,000.00	8,349,235,468.00	3,521,237,894.00	4,827,997,574.00	263,776,532.00
	PRESENTASE		96.94	40.88	56.05	3.06



Gambar 3. 24 *Presentase Penyerapan Anggaran Unit Kerja Eselon 2 pada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan s.d Triwulan IV T.A 2020*



Gambar 3. 25 Presentase Penyerapan Anggaran Unit Kerja Eselon 2 pada Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan s.d Triwulan IV T.A 2020

Disamping itu Program/kegiatan Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang dilakukan dengan mekanisme kontraktual sampai dengan Triwulan IV sebanyak 8 (delapan) kegiatan (dokumen kontrak) dengan total nilai kontrak sebesar Rp.615.474.700,-. sebagaimana tertera pada Tabel ini :

Tabel 3. 12 *Monitoring Kontrak*

Monitoring Kontrak							
No	NO SPM	Supplier	Tgl. Kontrak	Nomor	Uraian Kontrak	Akun	Nilai Kontrak
1	70659	CV KHALID MITRA SEJAHTERA	23/10/2020	SPK-0481/PPK07/MARVES/P L101/X/2020	Kajian Pembangunan Sistem Project Control Management Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Lingkungan	522131	48.950.000
2	70738	CV. MITRA BATAVIA KARYA	27/10/2020	SPK-0482/PPK07/MARVES/P L101/X/2020	Kajian pembangunan sistem informasi manajemen kearsipan Deputy bidang koordinasi pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	522131	49.439.500
3	70690	PT MUJARA CIPTA KREASI	09/10/2020	SPK-0509/PPK.07/MARVES/P L101/X/2020	Belanja bahan Batik, Kemeja Putih, Baju lapangan dan souvenir tembaga Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	521211	141.295.000
4	70674	PT MUJARA CIPTA KREASI	06/10/2020	SPK-0511/PPK.07/MARVES/P L101/X/2020	Belanja bahan dalam rangka penanganan pandemi Masker, Handsanitizer, daya tahan tubuh dan vitamin reha Deputy bidang koordinasi pengelolaan lingkungan dan kehutanan	521131	54.439.000
5	70703	NURHAYATI	01/09/2020	SPK-0417/PPK.07/MARVES/P L101/IX/2020	Belanja sewa Mobil Eselon II	522141	159.000.000
6	70849	PT. ENFYS KREATIF	10/11/2020	SPK-0543/PPK.07/MARVES/P L101/XI/2020	Webinar "Pilah sampah dari Rumah"	522191	63.351.200
7	70848	CV. JIA INDOTAMA PERKASA	27/11/2020	SPK-0534/PPK.07/MARVES/P L101/XI/2020	Studi Dampak Penerapan Artikel 6 Persetujuan Paris Terhadap Pencapaian Ndc Indonesia	521131	49.500.000
8	70848	CV ALASKA CITRA INDONESIA	27/11/2020	SPK-0535/PPK.07/MARVES/P L101/XI/2020	Studi Pembelajaran Dari Penyelenggaraan Instrumen Nek Domestik Di Berbagai Negara	521131	49.500.000

Kinerja pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya dinilai dari segi kecepatan dan ketepatan didalam pengajuan SPP oleh masing-masing PPK di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ataupun kecepatan dan ketepatan dalam penerbitan PPSPM menerbitkan SPM untuk pengajuan perceairan dana di KPPN. Lebih dari itu kinerja pengelolaan keuangan juga ditentukan oleh ketepatan dan kecepatan di Lingkup PPK dalam membuat dan menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan terhadap penggunaan uang Negara sebagai bentuk akuntabilitas keuangan.

Pengelolaan SPJ keuangan Lingkup Deputi IV yang dilakukan melalui mekanisme pengelolaan UP/GUP selama ini tidak mengalami kendala sama sekali, karena rata-rata dokumen pengajuan UP/TUP dapat diselesaikan paling lama 1 (satu) minggu dan seluruh dokumen sudah diselesaikan dalam bentuk dokumen rampung.

Pengelolaan SPJ Keuangan yang sedikit agak mengalami kendala adalah SPJ Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengelolaan LS, karena sebagian besar kegiatan dilkukan dengan LS. Jumlah SP2D LS (LS Bendahara, Pihak ketiga dan Kontraktual) pada Triwulan IV sebanyak 306 dokumen dan yang sudah dirampungkan seluruhnya sebanyak 306.

Tabel 3. 13 Pemberkasan SPJ Keuangan berdasarkan Mekanisme Pembayaran LS dan Kontraktual s.d Triwulan IV Tahun 2020

NO	UNIT KERJA	JUMLAH DOKUMEN	DOKUMEN RAMPUNG	DOKUMEN BELUM RAMPUNG	KET.
1	Asdep 1	52	52	0	
2	Asdep 2	30	30	0	
3	Asdep 3	65	65	0	
4	Asdep 4	70	70	0	
5	Asdep 5	49	49	0	
6	Setdep	40	40	0	
JUMLAH		306	306	0	

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran kegiatan di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan yang terjadi selama ini.

- a) Perencanaan anggaran kurang optimal sehingga masih sering dilakukan revisi anggaran;
- b) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) belum efektif;
- c) pelaksanaan lelang belum tepat waktu;
- d) Keterbatasan dana TUP.

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk mendukung peningkatan kinerja serta tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan setiap bulan sekali. Tujuan utama dilakukan monitoring dan evaluasi adalah untuk :

1. Menilai pelaksanaan anggaran kegiatan, sehingga dapat teridentifikasi apakah pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik, telah mencapai target keluarannya, telah memenuhi tujuannya, telah memberikan dampak seperti yang diharapkan, dan hal-hal lainnya.
2. Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif;
3. Merumuskan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan anggaran kegiatan untuk periode berikutnya;

LAKIP

Tahun 2020



Bab IV



**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN**

BAB. IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 ini disusun berdasarkan realisasi dari rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2019. Laporan yang berisikan informasi kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama bulan Januari – September 2020 sebagai media informasi dan komunikasi untuk lebih mengenalkan segala bentuk aktifitas di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sehingga pada akhirnya dapat tumbuh komunikasi yang baik dan kerja sama terkait dengan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Selama pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat beberapa kendala, baik internal maupun eksternal, yaitu:

4.1. Internal

- a. Kekurangan jumlah tenaga (pejabat dan pegawai pelaksana) Deputy Bidang koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan masih belum teratasi/terpenuhi.
- b. Masih terdapat pelaksana kegiatan yang belum dapat memfokuskan dan menjabarkan target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi utama bagian/unitnya.

4.2. Eksternal

- a. Masih banyak regulasi dan atau kewenangan yang tumpang tindih serta adanya ego sektoral Kementerian/Lembaga, pemda yang dapat menghambat lajunya pembangunan di bidang kemaritiman.
- b. Fluktuasi kondisi ekonomi regional dan global.

Laporan ini diharapkan mampu memenuhi akuntabilitas kinerja lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan dan menjadi bahan dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun selanjutnya.

Jakarta, 11 Januari 2021
Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan
Lingkungan dan Kehutanan



Nani Hendiarti

